



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

UKJIP

TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros tepat waktu. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros sebagai Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) BKAD Kabupaten Maros Tahun 2022 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKj-IP tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros yang sejalan dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros. LKj-IP BKAD Tahun 2022 menyajikan target dan capaian kinerja atas 4 (empat) sasaran penjabaran Renstra BKAD Kabupaten Maros tahun 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BKAD Kabupaten Maros Tahun 2022, meliputi : 1. Nilai SAKIP BKAD, 2. Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, 3. Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 4. Indeks Penyerapan Anggaran.

Berdasarkan capaian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan/sasaran dan indikator kinerja tahun 2022 rata-rata belum mencapai 100% hal mana disebabkan karena adanya beberapa anggaran pada sub kegiatan yang tidak terpakai sehingga penyerapan anggaran kurang optimal namun meski demikian tidak mengurangi kinerja dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros. Pengalokasian anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 sebesar **Rp. 209,216,099,939** yang terdiri dari Belanja Operasi : Rp. 51,831,625,613, Belanja Modal : Rp. 4,767,789,526, Belanja Tidak Terduga : Rp. 3, 800,000,000 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 148,816,684,800.

Capaian kinerja tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah yang berkualitas dan akuntabel dengan tetap menjunjung prinsip efektif dan efisiensi untuk mendukung capaian visi misi Bupati – Wakil Bupati Maros. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, disampaikan terima kasih.

Maros, 10 Januari 2023

Kepala BKAD Kabupaten Maros,



ANDI SAMSOPHYAN, SE, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19710903 199603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Sumber Daya Organisasi	34
1.5 Sarana dan Prasarana	36
1.6 Fungsi Strategis Organisasi	39
1.7 Isu Strategis	40
1.8 Sistematika Penulisan	41
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	42
2.1 Rencana Strategis	42
2.2 Rencana Kerja	43
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	43
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	47
3.2 Analisis Capaian Kinerja	33
3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan BKAD	48
3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	55
3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Keuangan Daerah secara Tepat Waktu dan dapat diakses oleh Masyarakat	56
3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4 Meningkatnya Daya Serap Anggaran dalam APBD	57
BAB IV PENUTUP	75
Lampiran Laporan Realisasi (LRA PEMDA)	76-101
Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros tahun 2022 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4 (empat) sasaran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS mengacu pada pengukuran kinerja instansi.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan selaras dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dengan system akuntansi dan tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros. LKjIP ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKAD tahun 2022 sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran oleh setiap instansi dan Perangkat Daerah untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. Sehubungan dengan itu BKAD Kabupaten Maros menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 terkait dengan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra yang bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKjIP tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Secara ringkas maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKAD Kabupaten Maros tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. Sebagai bahan penyempurnaan kebijakan yang diperlukan;
3. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja BKAD Kabupaten Maros dengan pembanding hasil Pengukuran Kinerja dan Penetapan Kinerja;
4. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja BKAD Kabupaten Maros pada tahun 2022;
5. Bahan evaluasi untuk Penyusunan Rencana Kegiatan dan Kinerja BKAD Kabupaten Maros pada tahun berikutnya.

1.3 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros memiliki tugas dan fungsi pada setiap entitas kerja yang ada didalamnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat Badan, Bidang Perencanaan dan Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

a. Tugas :

membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah yang menjadikewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

b. Fungsi :

- a) perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan serta pengelolaan barang milik daerah;
- b) pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan serta pengelolaan barang milik daerah;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan serta pengelolaan barang milik daerah;
- d) pelaksanaan administrasi Badan Keuangan dan Aset daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas :

- a) merumuskan program kerja dibidang keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat;

- b) mengoordinasikan pelaksanaan urusan yang berkaitan penyelenggaraan program kegiatan badan;
- c) mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d) membina bawahan dalam hal pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan bidang tugas;
- e) merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan serta pengelolaan barang milik daerah;
- f) melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan anggaran perbendaharaan, akuntansi, pelaporan serta pengelolaan barang milik daerah;
- g) melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan serta pengelolaan barang milik daerah;
- h) melaksanakan administrasi Badan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah
- i) melaksanakan koordinasi pengalokasian, penyusunan, perencanaan, penyediaan serta evaluasi dibidang perencanaan anggaran daerah;
- j) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang perbendaharaan daerah;
- k) melaksanakan pengoordinasian, penyusunan, konsolidasi, rekonsiliasi, analisis verifikasi serta pembinaan dibidang akuntansi dan pelaporan;
- l) mengoordinasikan, melaksanakan pengelolaan barang milik daerah;
- m) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2. Sekretariat Badan

a. Tugas :

Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan administrasi dan teknis operasional perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan

pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset serta penyusunan program dalam lingkungan badan.

b. Fungsi :

- a) pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
- b) pengoordinasian ketatausahaan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
- c) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
- d) pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian program kegiatan seluruh unsur organisasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas :

- a) merencanakan operasional kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur agar terhindar dari kesalahan;
- c) membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e) mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala sub bagian;
- f) mengoordinir penyusunan LAKIP badan sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g) menyusun rencana program kegiatan dan penganggaran sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h) mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;

- i) melaksanakan administrasi ketatausahaan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
- j) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
- k) melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan program kegiatan, seluruh unsur organisasi badan;
- l) mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan penyusunan kebijakan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja badan;
- m) penataan organisasi dan tata laksana;
- n) koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- o) pengelolaan barang milik / kekayaan negara;
- p) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- q) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah, membawahi :

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Mengelola administrasi umum, administrasi kepegawaian, melakukan urusan ketatausahaan, serta urusan tangga dan humans.

Uraian Tugas :

- a) merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;

- c) membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e) menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f) menghimpun daftar hadir pegawai sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk tertib administrasi;
- g) menyusun rencana formasi, informasi jabatan dan besetting pegawai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersedia lengkap dan akurat;
- h) mengembangkan penerapan system informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi sehingga dapat memperlancar akses data kepegawaian;
- i) melakukan administrasi, pengarsipan naskah dinas, pengklarifikasian dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar menurut jenisnya sesuai ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencariannya kembali;
- j) menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan dalam formasi pegawai;
- k) menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi penilaian pelaksanaan pekerjaan jabatan/on the job training;
- l) pengembangan sumber daya manusia dan kediklatan ASN serta penelitiandalam lingkup badan;
- m) melakukan kegiatan keprotokoleran lingkup badan;
- n) melakukan kegiatan kehumasan dan publikasi serta mengkoordinasikannya dengan unsur dalam lingkup badan maupun luar badan;
- o) menyediakan dan melaksanakan administrasi perkantoran, penggandaan, pencetakan dan pengarsipan dokumen;
- p) memfasilitasi keamanan dan ketertiban lingkungan badan;
- q) mengatur jam kerja serta mengawasi disiplin kerja pegawai;
- r) memfasilitasi pelayanan hukum dalam lingkup badan;
- s) melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala;
- t) menyusun daftar urut kepangkatan;
- u) membuat usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan usulan pensiun;
- v) membuat dokumen penugasan pegawai;

- w) melakukan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan dan formasi jabatan;
- x) melakukan administrasi cuti pegawai;
- y) mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- z) melaporkan hasil pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- aa) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2). Sub Bagian Program

Tugas :

mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan evaluasi laporan kinerja.

Uraian Tugas :

- a) merencanakan kegiatan subbagian berdasarkan rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c) membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e) menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f) menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g) menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- h) menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- i) melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan usulan setiap kegiatan lingkup badan;
- j) mengumpulkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unsur terkait dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja bidang lingkup badan;
- l) mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan laporan evaluasi kinerja bidang lingkup badan;
- m) menyiapkan bahan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai landasan kinerja Pegawai;
- n) menyiapkan, menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan untuk lebih transparan dalam pengelolaan data dan informasi;
- o) mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan tahunan untuk bahan pertanggung jawaban pimpinan;
- p) mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- q) melaporkan hasil pelaksanaan tugas subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3). Sub Bagian Keuangan dan Aset

Tugas :

melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan aset , meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan, admimnistrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang serta aset.

Uraian Tugas :

- a) merencanakan kegiatan sub bagian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c) membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- e) menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- f) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data keuangan untuk mendapatkan data yang akurat;
- g) melakukan pengendalian keuangan lingkup badan yang terencana sebagai kontrol agar terhindar dari kesalahan;
- h) melaksanakan pengendalian pengeluaran kas (cash flow) sebagai kontrol terhadap transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas;
- i) menyusun dokumen terhadap penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup badan;
- j) melaksanakan pengujian dan analisa Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP) Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Langsung (LS) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup badan;
- k) melakukan penatausahaan keuangan yang meliputi penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran;
- l) melakukan penerimaan, penyimpanan dan penatausahaan seluruh pendapatan sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- m) menyusun dan menerbitkan dokumen yang diperlukan dalam pencairan dan pertanggung jawaban anggaran;
- n) meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pencairan anggaran;

- o) menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan pendistribusian pemeliharaan, inventarisasi dan prosedur yang berlaku agar pengelolaan aset dapat berjalan dengan baik dan benar;
- p) mengatur operasional kendaraan dinas, parkir, gedung kantor, perumahan dinas, asrama, dan halaman kantor;
- q) membuat laporan keuangan realisasi anggaran belanja menurut rekening berdasarkan pengeluaran SPM;
- r) melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kesejahteraan pegawai;
- s) meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara sesuai prosedur yang berlaku untuk menghindari kesalahan;
- t) meneliti kebenaran pertanggung jawaban bendahara pengeluaran sesuai peraturan dan prosedur agar terhindar dari kesalahan;
- u) melakukan penerimaan, penyimpanan dan penatausahaan seluruh pendapatan sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- v) menerima, menyimpan dan mendistribusikan barang;
- w) melakukan, mengelola dan mengawasi penerimaan dan pemanfaatan pendapatan dari program bantuan;
- x) mengumpulkan dan mengolah data barang persediaan;
- y) membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- z) melakukan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan unsur lain dalam lingkup badan maupun luar badan dengan sepengetahuan atasan;
- aa) mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- bb) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan aset dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Perencanaan dan Anggaran

a. Tugas :

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan dibidang analisa dan kebijakan serta penusunan anggaran.

b. Fungsi :

- a) pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang analisa dan kebijakan serta penyusunan anggaran;
- b) pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dibidang analisa dan kebijakan serta penyusunan anggaran;
- c) pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang analisa dan kebijakan serta penyusunan anggaran; dan;
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas :

- a) merencanakan operasional dan menyusun program dan kegiatan bidang sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
- c) membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e) mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala subbidang;
- f) mengumpulkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g) melaksanakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUA/PPAS perubahan;
- h) melaksanakan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan ATAU RKAP/DPPA SKPD;

- i) melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- j) melaksanakan penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
- k) mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
- l) mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- m) mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- n) melaksanakan penyediaan anggaran kas;
- o) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- p) menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- q) melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- r) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- s) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Perencanaan dan Anggaran, membawahi :

1). Sub Bidang Analisa dan Kebijakan Anggaran

Tugas :

Membantu Kepala Bidang dalam melakukan kegiatan analisis dan kebijakan anggaran.

Uraian Tugas :

- a). merencanakan kegiatan sub bidang sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b). membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;

- c). membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d). memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e). menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f). menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g). menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- h). menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- i). mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- j). menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- k). mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- l). melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- m). melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- n). melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- o). melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- p). membina SKPD dibawah koordinasi asisten;
- q). mengoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten;
- r). memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- s). melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- t). mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas -tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- u). melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- v). melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2). Sub Bidang Penyusunan Anggaran

Tugas :

Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dibidang penyusunan anggaran.

Uraian Tugas :

- a). merencanakan kegiatan subbidang sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b). membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c). membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d). memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e). menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f). menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g). melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- h). melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- i). melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- j). melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k). melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- l). melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- m). melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;

- n). melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- o). mengoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten;
- p). mengoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten;
- q). memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- r). melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- s). mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- t). melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u). melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Perbendaharaan

a. Tugas :

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan dibidang Perbendaharaan.

b. Fungsi :

- a). pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pengeluaran Kas dan Pembiayaan;
- b). pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pengeluaran Kas dan Pembiayaan;
- c). pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pelaksanaan dibidang Pengeluaran Kas dan Pembiayaan; dan
- d). pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya .

c. Uraian Tugas :

- a). merencanakan operasional dan menyusun program dan kegiatan bidang sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b). memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
- c). membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d). menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e). mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala subbidang;
- f). mengumpulkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g). mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- h). mengoordinasikan pemindah bukuan uang kas daerah;
- i). mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
- j). mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- k). mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- l). mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- m). mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, sertapenerbitan SKPP;
- n). mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan / pemotongan dan penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- o). mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- p). mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;

- q). mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jawaban (SPJ);
- r). mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- s). koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- t). memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- u). menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- v). melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- w). mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- x). membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Perbendaharaan, membawahi :

1). Sub Bidang Penatausahaan Keuangan

Tugas :

Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan dibidang Penatausahaan Keuangan

Uraian Tugas :

- a). merencanakan kegiatan subbidang sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b). membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c). membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- d). memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e). menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f). menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g). melaksanakan Penatausahaan Keuangan;
- h). melaksanakan pemindah bukuan uang kas daerah;
- i). mengkaji ulang hasil verifikasi Penatausahaan Keuangan;
- j). mengkaji ulang hasil verifikasi pemindah bukuan kas daerah;
- k). melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- l). melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;
- m). melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggung jawaban pendapatan/ penerimaan kas;
- n). melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- o). melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
- p). menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
- q). menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
- r). melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- s). melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- t). melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
- u). melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;

- v). meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji;
- w). melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- x). melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- y). meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
- z). melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
- aa). melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;
- bb). merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
- cc). menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
- dd). menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah;
- ee). melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- ff). melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kas daerah;
- gg). melaksanakan bimbingan teknis pemindah bukuan kas daerah;
- hh). memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- ii). melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- jj). mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- kk). melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ll). melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2). Sub Bidang Investasi dan Pinjaman

Tugas :

Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan dibidang Investasi dan Pinjaman

Uraian Tugas :

- a). merencanakan kegiatan subbidang sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b). membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c). membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d). memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e). menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f). menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g). merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
- h). melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;
- i). melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi / pengembalian kelebihan penerimaan;
- j). menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait pendapatan daerah;
- k). memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- l). mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- m). menyimpan uang daerah;
- n). menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah;
- o). melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

- p). melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPD lain;
- q). melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan);
- r). mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan);
- s). menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
- t). menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah;
- u). melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan pembiayaan daerah;
- v). koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- w). memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- x). melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- y). mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- z). melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- aa). melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3). Sub Koordinator

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Tugas :

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

b. Fungsi :

- a). menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan;

- b). penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c). penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - d). pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembukuan dan pelaporan keuangan; dan
 - e). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- c. Uraian Tugas :
- a). merencanakan operasional dan menyusun program dan kegiatan bidang sebagai pedoman dan acuan kerja;
 - b). memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
 - c). membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d). menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
 - e). mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala subbidang;
 - f). menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
 - g). mengoordinasikan pembukuan anggaran penerimaan kas daerah;
 - h). mengoordinasikan pembukuan anggaran pengeluaran kas daerah;
 - i). mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - j). mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah provinsi;
 - k). mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten;
 - l). melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;

- m). melaksanakan penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- n). melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- o). melaksanakan penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- p). melaksanakan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- q). melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- r). melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- s). melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai system akuntansi pemerintah daerah;
- t). memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- u). menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan; dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- v). melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- w). mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- x). membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :

1). Sub Bidang Pembukuan

Tugas :

Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan dibidang Pembukuan

Uraian Tugas :

- a). merencanakan kegiatan subbidang sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b). membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c). membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d). memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e). menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f). menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g). melaksanakan pengolahan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- h). mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan anggaran dan pengeluaran kas daerah;
- i). menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas daerah;
- j). melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD;
- k). melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD;
- l). melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan non kas yang dilakukan oleh SKPD;
- m). melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
- n). melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
- o). melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan penerimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
- p). menganalisa laporan realisasi penerimaan;
- q). menyusun laporan realisasi penerimaan APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
- r). melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan dan pengeluaran (bukti memorial);

- s). menyusun kebijakan serta system dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran;
- t). menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran;
- u). menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
- v). menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- w). melakukan posting atas pengeluaran;
- x). memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- y). melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- z). mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- aa). melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- bb). melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2). Sub Bidang Pelaporan Keuangan

Tugas :

Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pelaporan keuangan

Uraian Tugas :

- a). merencanakan kegiatan sub bidang sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b). membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- c). membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d). memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;

- e). menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f). menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g). menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan;
- h). melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten;
- i). menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas daerah;
- j). menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
- k). mengikhtisarkan pengeluaran;
- l). menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- m). menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
- n). menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- o). melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
- p). menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- q). menganalisa laporan realisasi pengeluaran;
- r). melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan sesuai system akuntansi pemerintah daerah;
- s). menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran;
- t). menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran;
- u). melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD;
- v). menyusun kebijakan serta system dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- w). melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- x). menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD;
- y). menyusun bahan untuk tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- z). menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- aa). menyiapkan bahan tindaklanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- bb). menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- cc). melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- dd). menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- ee). memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- ff). melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- gg). mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- hh). melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ii). melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3). Sub Koordinator

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Tugas :

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan penatusahaan serta pemanfaatan dan pengendalian asset dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah

b. Fungsi :

- a). penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penatausahaan serta pemanfaatan dan pengendalian aset;
- b). penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dibidang penatausahaan serta pemanfaatan dan pengendalian aset;
- c). penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dibidang penatausahaan serta pemanfaatan dan pengendalian aset;
- d). pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapanbahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penatausahaan serta pemanfaatan dan pengendalian aset; dan
- e). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c. Uraian Tugas :

- a). merencanakan operasional dan menyusun program dan kegiatan bidang sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b). memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
- c). membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d). menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e). mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala subbidang;
- f). menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g). mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- h). mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- i). mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- j). melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah;

- k). mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- l). mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- m). mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah;
- n). mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
- o). meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- p). mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- q). mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
- r). mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- s). memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- t). menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- u). melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- v). mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- w). membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi :

- 1). Sub Bidang Penatausahaan Aset

Tugas :

Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Penatausahaan Aset di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Uraian Tugas :

- a). merencanakan operasional dan menyusun program dan kegiatan bidang sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b). memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
- c). membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d). menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e). mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala subbidang;
- f). menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g). meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- h). meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- i). meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- j). menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- k). menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala;
- l). melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
- m). melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD;
- n). menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- o). menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standard akuntansi pemerintah pusat (Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014);
- p). melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi;

- q). menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan Keuangan pemerintah daerah;
- r). memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- s). menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- t). melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- u). mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- v). membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2). Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset

Tugas :

Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Uraian Tugas :

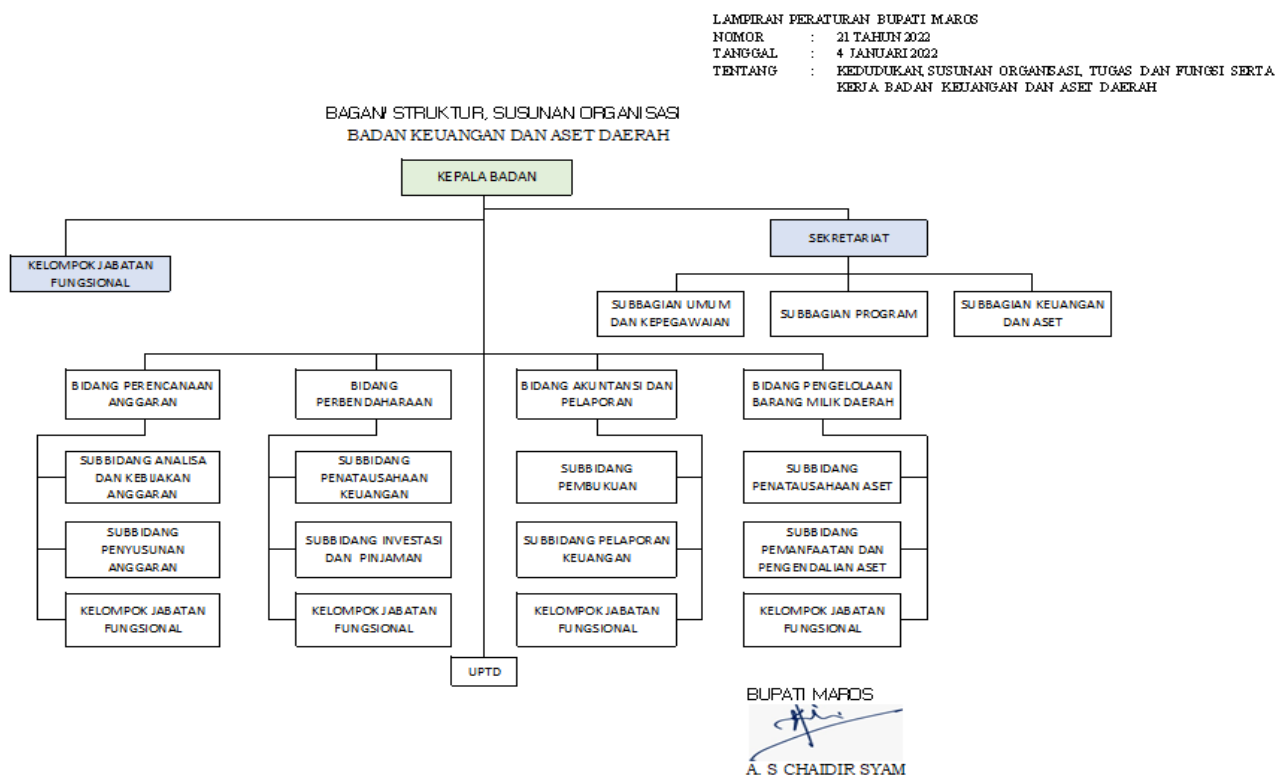
- a). merencanakan operasional dan menyusun program dan kegiatan bidang sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b). memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
- c). membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d). menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e). mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala subbidang;
- f). menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- g). meneliti dokumen usulan pemanfaatan Barang Milik Daerah;

- h). menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- i). menyiapkan dokumen hasil penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- j). menyiapkan konsep berita acara serah terima penggunaan barang milik daerah;
- k). menyiapkan konsep Surat Ijin Penghunian (SIP) penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- l). melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah;
- m). menyimpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
- n). meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- o). menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- p). meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- q). menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- r). menyiapkan dokumen hasil penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka pindah tangan Barang Milik Daerah;
- s). memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- t). menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- u). melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- v). mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- w). membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3). Sub Koordinator

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Maros sebagai berikut :



1.4 Sumber Daya Organisasi

① Komposisi SDM ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros

Pada tahun 2022 jumlah ASN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros sebanyak 62 orang yang terdiri atas laki-laki 32 orang dan perempuan 30 orang. Jumlah ASN laki-laki meski lebih banyak dari jumlah ASN perempuan, masih memenuhi kesetaraan gender sehingga pelaksanaan tugas aktifitas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros berjalan lancar sesuai tanggung jawab dan berdasarkan uraian tugas masing-masing ASN.

Adapun Komposisi SDM ASN dapat terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4.1
Komposisi ASN BKAD berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS PEGAWAI ASN	JUMLAH PEGAWAI ASN TAHUN 2022		
		Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	32	30	62

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian BKAD Kab. Maros Tahun 2022

2 Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros pada Tahun 2022 dapat diklasifikasikan berdasarkan jenjang / tingkat pendidikan seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 1.4.2
Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH ASN		TOTAL
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Strata Tiga (S.3)	0	0	0
2	Strata Dua (S.2)	5	8	13
3	Strata Satu (S.1)	16	19	35
4	Diploma 3 (D.III)	0	2	2
5	SMA/SMK Sederajat	10	1	11
6	SMP Sederajat	0	0	0
7	SD Sederajat	1	0	1
JUMLAH		32	30	62

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian BKAD Kab. Maros Tahun 2022

Pada tabel 1.4.2 diatas menunjukkan bahwa ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros berdasarkan tingkat pendidikan yang terbanyak adalah : Strata Satu (S.1) ; 35 ASN, Strata Satu (S.2) : 13 ASN, SMA/SMK Sederajat : 11 ASN, SMP Sederajat : 0, SD Sederajat : 1 ASN dan Diploma III : 2 ASN. Sedangkan ASN yang berpendidikan Strata 3 (S.3): tidak ada.

③ Komposisi ASN Menurut Jenjang Pangkat dan Golongan

Komposisi ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros menurut Jenjang pangkat dan golongan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.4.3
Komposisi ASN menurut jenjang Golongan Tahun 2022

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		L	P	
1.	I	1	0	1
2.	II	11	4	15
3.	III	17	23	40
4.	IV	3	3	6
Jumlah		32	30	62

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian BKAD Kab. Maros Tahun 2022

- Eselon II B : 1 ASN
- Eselon III A : 1 ASN
- Eselon III B : 4 ASN
- Eselon IV A : 11 ASN
- Sub Koordinator : 3 ASN
- Staf / Pelaksana : 42 ASN

Total jumlah ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maros Tahun 2022 sebanyak : 62 ASN.

1.5 Sarana dan Prasarana

Kebutuhan Sarana dan Prasarana pendukung adalah :

JENIS	TOTAL KESELURUHAN	SATUAN	KONDISI		
			BAIK	KURANG BAIK	Rusak Berat
Sepeda Motor	56	Unit	30	20	5
Mini Bus	1	Unit	1	-	-
Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2	Unit	2	-	-
Station Wagon	11	Unit	8	-	-
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	7	Luas	7	-	-
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	4	Luas	4	-	-

Tanah Bangunan Pasar	1	Luas	1	-	-
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9	Luas	9	-	-
Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1	Luas	1	-	-
Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1	Luas	1	-	-
Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1	Luas	1	-	-
Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	1	Luas	1	-	-
Tanah Sawah Irigasi	1	Luas	1	-	-
Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7	Luas	7	-	-
Tanah Perkebunan Lainnya	5	Luas	5	-	-
Tanah Lapangan Sepak Bola	2	Luas	2	-	-
Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	Luas	4	3	-
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	5	Luas	5	-	-
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2	Luas	1	1	-
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2	Luas	1	-	-
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	3	Luas	2	-	-
Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen/	7	Luas	6	1	-
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	3	Luas	2	1	-
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat Lain-lain	0	0	0	0	0
Asrama Permanen	1	Luas	1	-	-
Pagar Permanen	2	Buah	2	-	-
Jalan Khusus Lainnya	1	Luas	1	-	-
AC	24	Unit	7	-	-
AC Split	1	Unit	56	6	-
Alat Penghancur Kertas	1	Buah	4	-	-
Brankas	7	Buah	9	-	-
Dispenser	2	Buah	8	2	-
Filling Besi/Metal	1	Buah	6	2	-

Gordyn	5	Buah	32	-	-
Global Positioning System (GPS)	2	Buah	2	-	-
Kamera Electronic	1	Buah	1	-	-
Kursi putar	52	Buah	10	1	-
Kursi besi/metal	100	Buah	94	-	-
Kursi	1	Buah	2	-	-
Kursi Kayu	1	Buah	22	3	-
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Buah	70	-	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	Buah	1	1	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Buah	5	-	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	Buah	12	-	-
Kursi Rapat	100	Buah	67	-	-
Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	5	Buah	8	-	-
Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	8	Buah	5	-	-
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	8	Buah	1	1	-
Kursi Tamu	8	Buah	16	1	-
Komputer PC	2	Buah	27	-	-
Latar Layar Dinding Proyektor	1	Buah	8	-	-
Lemari Es	5	Buah	14	-	-
Lemari kayu	16	Buah	71	13	-
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	Buah	17	-	-
Laptop	26	Buah	45	2	-
Meja Rapat Pejabat Eselon II	4	Buah	3	1	-
Meja 1/2 biro	125	Buah	67	4	-
Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Buah	1	-	-
Meja Reseption	1	Buah	3	-	-
Meja Kerja	5	Buah	10	-	-
Meja Komputer/Print	3	Buah	30	3	-
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Buah	7	-	-
Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Buah	5	-	-
Mesin Foto Copy	1	Buah	-	1	-
Printer	51	Buah	83	1	-
Papan Pengumuman	1	Buah	2	-	-
Papan Visuil	2	Buah	14	-	-

Rak Besi	2	Buah	3	-	-
Router	1	Buah	1	-	-
Sofa	1	Buah	3	1	-
Scanner	3	Buah	5	-	-
Televisi	3	Buah	2	-	-
Jumlah	872		966	76	5

Sumber : KIR Subag Keuangan dan Aset BKAD Tahun 2022

1.6 Fungsi Strategis Organisasi

Berdasarkan Uraian Tugas, Pokok dan Fungsi BKAD Kabupaten Maros memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan dan Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Bidang Perencanaan dan Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Bidang Perencanaan dan Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Pembinaan penyelenggaraan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan dan Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan BKAD Kabupaten Maros; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Fungsi tersebut merupakan penjabaran dari tugas BKAD Kabupaten Maros, yakni sebagai fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pencapaian Visi Kabupaten Maros : ***“Maros Sejahtera, Religius, dan Berdaya Saing.”***

1.7 Isu Strategis

Isu-isu strategis atau permasalahan utama yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja sumber daya aparatur dikarenakan masih sedikitnya program peningkatan kapasitas aparatur/pengembangan aparatur khususnya terkait pelaporan realisasi anggaran belanja keuangan, dan aset daerah melalui aplikasi SIPD;
2. Kepatuhan anggaran OPD;
3. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi Barang Milik Daerah belum Optimal;
4. Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai yang mendukung transparansi keuangan daerah;
5. Penempatan tenaga ASN yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas;
6. Belum optimalnya perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Adapun upaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Membuat jurnal Target dan Realisasi anggaran belanja perbulan secara manual sehingga terhindar dari kesalahan penginputan dalam aplikasi SIPD.
2. Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah pada penginputan anggaran dalam aplikasi SIPD sesuai perencanaan, tepat waktu, efisien dan efektif.
3. Melakukan konsolidasi, koordinasi dan rekonsiliasi terhadap Perangkat Daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah agar valid dan tepat waktu.
4. Mengkoordinasikan pembinaan pengelolaan Keuangan pada BLUD dengan Perangkat Daerah terkait.
5. Melaksanakan pendampingan rekonsiliasi penyusunan perencanaan Barang Milik Daerah dalam bentuk RKBMD, dan distribusi serta pembinaan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.8 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara rinci muatan dokumen LKjIP ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF, menyajikan ringkasan isi dari LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LKjIP, maksud dan tujuan, Gambaran Umum Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas, Komposisi SDM organisasi, Sarana dan Prasarana, Fungsi Strategis Organisasi, Isu-su Strategis dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan muatan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pengukuran kinerja, target dan realisasi kinerja tahun 2022 evaluasi dan analisis realisasi dan pencapaian kinerja s/d tahun 2022, evaluasi realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah (Renstra) terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2022, dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Suatu unit organisasi perlu membuat perencanaan agar seluruh aktivitas organisasi dapat diperkirakan dan dikendalikan. Dengan adanya perencanaan yang jelas maka suatu organisasi akan dapat mengelola potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros sejalan dengan misi pertama, yakni : “ Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik”, sehingga pengelolaan keuangan dan aset daerah ke depan harus menjadi pendukung utama pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Tujuan Rencana Strategis merupakan penjabaran dari visi yang ditindaklanjuti dengan pencapaian sasaran strategis, tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. dan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros yaitu : “ Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas, bertanggungjawab, profesional, transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan setiap tahun. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam perencanaan strategis organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pelayanan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Aset Daerah

2.2 Rencana Kerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, disusun suatu Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Rencana Kerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan / sub kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk periode tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.1
Target dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4
1	Nilai SAKIP BKAD	Nilai Level	74,5 (BB) Sangat Baik)
2	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (D1)	Nilai Indeks	5,66
3	Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (D3)	Nilai Indeks	9,30
4	Indeks Penyerapan Anggaran (D4)	Nilai Indeks	11,11

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, maka dari itu target kinerja yang diperjanjikan harus berkualitas *out come* disamping *output* dan harus ada saling keterkaitan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara atasan dan bawahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar peniaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi/punishment;
4. Sebagai dasar bagi atasan dan bawahan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja atasan dan bawahan;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penetapan kinerja tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.1

Perjanjian Kinerja Kepala BKAD Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKAD	74,5 (BB) Sangat Baik)	Nilai Level
2	Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (D1)	5,66	Nilai Indeks
3	Meningkatnya ketersediaan dokumen keuangan Daerah secara tepat waktu dan dapat diakses oleh Masyarakat	Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (D3)	9,30	Nilai Indeks
4	Meningkatnya daya serap anggaran dalam APBD	Indeks Penyerapan Anggaran (D4)	11,11	Nilai Indeks

Selanjutnya Program, Indikator Program dan Anggaran pendukung Target Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis BKAD Kabupaten Maros Tahun 2022 diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4.2

Program, Indikator Kinerja dan Anggaran BKAD Kabupaten Maros Tahun 2022

No.	Program / Indikator	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / <i>Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan</i>	49,592,661,913	DAU
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah / <i>Persentase Penyerapan anggaran sesuai target</i>	154,751,652,100	DAU
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah / <i>Persentase Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	4,871,785,926	DAU
TOTAL		209,216,099,939	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan BKAD Tahun Anggaran 2022

2.5 Alokasi anggaran perbidang

Dukungan alokasi anggaran Pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022, diuraikan menurut alokasi anggaran perbidang sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5.1

Dukungan Alokasi Anggaran Per Bidang Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022

NO.	NAMA BIDANG / BAGIAN	ANGGARAN (Rp)
1	SEKRETARIAT	49,592,661,913
2.	BIDANG PERENCANAAN DAN ANGGARAN	674,200,000
3.	BIDANG PERBENDAHARAAN	153,350,109,900
4.	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	727,342,200
5.	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4,326,789,526
JUMLAH ANGGARAN		209,216,099,939

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan BKAD Tahun Anggaran 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kembali perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi capaian kinerja yang merupakan evaluasi keberhasilan tujuan dan sasaran jangka menengah, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran sesuai yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menggambarkan capaian kinerja organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros pada tahun 2022 yang menetapkan 2 (dua) Tujuan, 4 (empat) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja, yakni dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maros tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan dengan Bupati Maros, Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100\%$$

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2022 ini merupakan kelanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Maros dan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021-2026. Adapun perhitungan capaian kinerja tahun 2022 untuk sasaran yang diampu, sebagai berikut :

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan BKAD

Tabel 3.2.1
Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RENSTRA (2022)	Target Nasional (jika ada)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKAD (Nilai SAKIP)	Nilai Level	72,65	BB (74,5)	B (60,75)	81,54	A (82,5)	0

Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2022, terdapat 1(satu) Indikator Kinerja yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja BKAD (Nilai Sakip), dimana dalam menghitung indikator kinerja menggunakan formulasi : **Realisasi / Target di kali 100%** atau sama dengan $60,75/74,5 \times 100\%$

Adapun pencapaian kinerja :

1. Capaian Realisasi pada tahun 2022 sebesar 81,54% dimana pencapaiannya didapatkan dari realisasi sebesar 60,75 dibagi target sebesar 74,5 di kali 100%
2. Perbandingan Capaian Kinerja pada tahun 2022 sebesar 81,54% dengan Capaian Kinerja pada tahun 2021 sebesar 72,65% naik sebesar 8,8%.
3. Target akhir tahun Renstra 2022 = 82,5 (A) dan terealisasi 60,75 (B) tidak mencapai target, disebabkan karena ditiadakannya komponen penilaian SAKIP pada tahun 2022, yakni Pencapaian Kinerja dengan bobot 20% sehingga berpengaruh pada nilai hasil evaluasi kinerja.
4. Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja BKAD pada tahun 2022 mendapatkan nilai B (60,75) dengan Target Kinerja BB (74,5) tidak sesuai dengan target akhir Renstra BKAD tahun 2022

5. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kekurangan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :

Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Kinerja Layanan Kesekretariatan BKAD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Penunjang Pemerintahan Daerah	<p>1. Perencanaan Kinerja (30%), yang terdiri dari sub Komponen :</p> <p>a. Renstra (10%)</p> <p>b. Rencana Kerja (Renja) (20%)</p> <p>2. Pengukuran Kinerja (30%), yang terdiri dari sub komponen:</p> <p>a. Pemenuhan Pengukuran (6%)</p> <p>b. Kualitas Pengukuran (9%)</p> <p>c. Implementasi Pengukuran (15%)</p> <p>3. Pelaporan Kinerja (15%), yang terdiri dari sub komponen:</p> <p>a. Pemenuhan Pelaporan (3%)</p> <p>b. Kualitas Pelaporan (7,5%)</p> <p>c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)</p> <p>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) ,yang terdiri dari sub komponen:</p> <p>a. Evaluasi Internal (5 %)</p> <p>b. Evaluasi secara berkualitas (7,50%)</p> <p>c. Implementasi Sakip (12,50 %)</p> <p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen -komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori AA (>90 -100 = Sangat Memuaskan). 	Persen	100	81,54 %

			<ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (>80 – 90 = Memuaskan) • Kategori BB (>70 – 80 = Sangat Baik) • Kategori B (>60 – 70 = Baik) • Kategori CC (>50 – 60 = Cukup) • Kategori C (>30 – 50 = Kurang) 			
--	--	--	--	--	--	--

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi
Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja BKAD	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Keseluruhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Dok	19	19 Dokumen tercapai pada Triwulan III
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan BKAD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan BKAD	Jumlah Keseluruhan Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	Dok	71	71 Dok tercapai pada Triwulan IV
Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi BMD BKAD	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada BKAD	Jumlah Keseluruhan Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada BKAD	Dok	16	15 Dok tercapai pada Triwulan IV
Tersedianya layanan administrasi kepegawaian BKAD	Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur PD yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah keseluruhan Aparatur PD yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	Steel	80	Tercapai pada triwulan IV
Tersedianya Jenis Layanan Administrasi Umum BKAD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum	Jumlah keseluruhan Jenis Layanan Administrasi Umum BKAD yang	Jenis	3.108	2.547 / tercapai pada triwulan

yang dilaksanakan		BKAD yang dilaksanakan	dilaksanakan			IV
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah keseluruhan Jenis BMD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Unit	10	6 unit /tercapai pada triwulan IV
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah keseluruhan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	3	3 Jenis / tercapai pada triwulan IV
Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah keseluruhan Unit BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	484	430 unit / tercapai pada triwulan IV

Analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing uraian kegiatan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja BKAD, dengan target 19 dokumen tercapai 100% pada triwulan III.
Out Put : Dokumen Renja, Renstra, Dokumen RKA Pokok dan Perubahan, Dokumen DPA Pokok dan Perubahan, Dokumen SAKIP, Dokumen LKjIP, Evaluasi Kinerja Triwulanan
2. Sasaran Kegiatan Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan BKAD, dengan target 71 dokumen dapat tercapai 100% pada triwulan IV.
Out Put : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Dokumen Administrasi Pelaksanaan tugas ASN, Dokumen Penatausahaan, Pengujian/Verifikasi Keuangan BKAD, Laporan Keuangan Akhir Tahun BKAD, Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran BKAD.
3. Sasaran Kegiatan Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi BMD BKAD, dengan target 16 dokumen tercapai 15 dokumen atau 93,75% pada triwulan IV.

Out Put : RKMBD BKAD, KIB, KIR, Pentausahaan BMD BKAD, Dokumen Pemanfaatan BMD BKAD.

4. Sasaran Kegiatan Tersedianya layanan administrasi kepegawaian BKAD, dengan target 80 Steel dapat tercapai 100% pada triwulan IV

Out Put : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

5. Sasaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan target 3.108 Jenis dapat tercapai 2.547 Jenis pada Triwulan IV.

Out Put : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6. Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan target 10 unit hanya tercapai 4 unit atau sebesar 66,7% tercapai pada triwulan IV.

Out Put : Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Sasaran Kegiatan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan target 3 Jenis tercapai 100% pada triwulan IV.

Out Put : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target 484 unit tercapai 430 unit atau 88,84 % pada triwulan IV.

Out Put : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dengan melihat analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja diatas tidak mencapai target, karena ada beberapa sub kegiatan yang kinerjanya tidak terealisasi 100% sehingga menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 berdasarkan Sumber Daya Keuangan

- Analisis ini ditunjang dengan sumber daya anggaran pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang seperti tertuang pada tabel berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	SUMBER DAYA KEUANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	49,592,661,913	44,635,369,214	4,957,292,699	90.00
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000	10,000,000	-	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	700,000	700,000	-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	760,000	760,000	-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,000,000	2,000,000	-	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,180,000	2,180,000	-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,500,000	1,500,000	-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,160,000	1,160,000	-	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,700,000	1,700,000	-	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22,665,242,278	18,706,138,458	3,959,103,820	82.53
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21,701,647,728	17,837,932,008	3,863,715,720	82.20
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70,672,200	70,549,200	123,000	99.83
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	512,760,000	474,233,000	38,527,000	92.49
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	23,708,600	23,708,600	-	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24,859,900	8,859,900	16,000,000	35.64
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	264,695,800	224,157,700	40,538,100	84.69

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	42,114,300	42,114,300	-	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	24,783,750	24,583,750	200,000	99.19
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	121,766,550	90,016,550	31,750,000	73.93
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD pada SKPD	630,000	0	630,000	-
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pada SKPD	39,706,850	26,986,850	12,720,000	67.97
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	22,934,200	22,534,200	400,000	98.26
	Penatausahaan BMD pada SKPD	33,497,600	21,497,600	12,000,000	64.18
	Pemanfaatan BMD pada SKPD	24,997,900	18,997,900	6,000,000	76.00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,000,000	20,000,000	-	100
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20,000,000	20,000,000	-	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	919,033,400	783,538,592	135,494,808	85.26
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,390,000	8,570,000	2,820,000	75.24
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,000,000	29,339,800	660,200	97.80
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135,006,000	116,099,700	18,906,300	86.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	138,217,400	88,249,000	49,968,400	63.85
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	160,000,000	113,560,000	46,440,000	70.98
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	444,420,000	427,720,092	16,699,908	96.24
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	451,500,000	394,400,000	57,100,000	87.35
	Pengadaan Mebel	200,000,000	198,600,000.00	1,400,000.00	99.30
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	251,500,000	195,800,000	55,700,000	77.85
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21,438,969,904	21,068,181,339	370,788,565	98.27
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48,060,000	39,000,000	9,060,000	81.15
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19,917,879,504	19,775,650,539	142,228,965	99.29
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,473,030,400	1,253,530,800	219,499,600	85.10

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,966,149,781	3,563,094,275	403,055,506	89.84
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,939,038,800	1,936,085,209	2,953,591	99.85
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,896,689,981	1,513,522,566	383,167,415	79.80
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65,421,000	48,501,000	16,920,000	74.14
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65,000,000	64,985,500	14,500	99.98

Realisasi Anggaran Program , Kegiatan, Sub Kegiatan pendukung Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebesar Rp. **44,635,369,214** atau sebesar **90 %** dari total pagu sebesar Rp. **49,592,661,913** dan terdapat selisih Rp. **4,957,292,699** atau sebesar **9,99%** dari pagu yang ditentukan.

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Tabel 3.2.2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RENSTRA (2022)	Target Nasional (jika ada)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Nilai Indeks	98,70	11,55	11,40	98,70	12,33	0

Sasaran 2. Meningkatnya Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yakni :

1. Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran , dimana dalam menghitung indikator kinerja menggunakan formulasi : **Realisasi / Target di kali 100%**

Adapun pencapaian kinerja :

- Capaian Realisasi pada tahun 2022 sebesar 98,70% dimana pencapaiannya didapatkan dari realisasi sebesar 11,40 dibagi target 11,55 dikali 100%
- Perbandingan Capaian Kinerja pada tahun 2022 sebesar 98,70% dengan Capaian Kinerja pada tahun 2021 sama hasilnya, hal ini dikarenakan realisasi dan target tahun 2022 sama dengan realisasi dan target pada tahun 2021.
- Target Akhir Tahun Renstra 2022 : 12,33 dan terealisasi : 11,40 belum mencapai target disebabkan karena jumlah program dalam RPJMD tidak sesuai dengan jumlah program Pada RKPD dan KUA PPAS serta terdapat pula program pada RKPD yang tidak dianggarkan pada KUA PPAS.

Hal itu pula yang menyebabkan Capaian Kinerja Indeks Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada tahun 2022 tidak mencapai target.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Keuangan Daerah secara Tepat Waktu dan dapat diakses oleh Masyarakat

Tabel 3.2.3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RENSTRA (2022)	Target Nasional (jika ada)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Indeks	94,55	10,23	9,83	96,07	15	0

Sasaran 3. Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Keuangan Daerah secara Tepat Waktu dan dapat diakses oleh Masyarakat, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yakni :

1. Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, formulasi perhitungan : **Realisasi / Target di kali 100%**

Capaian Kinerja sebagai berikut :

- Capaian Realisasi pada tahun 2022 sebesar 96,07% dimana pencapaiannya didapatkan dari realisasi sebesar 9,83 dibagi target 10,23 dikali 100%

- Capaian Kinerja pada tahun 2021 sebesar 94,55% yang berarti ada kenaikan sebesar 1,52% pada tahun 2022, hal ini disebabkan karena meningkatnya capaian ketepatan waktu penyelesaian laporan dan ketersediaan dokumen sesuai waktu yang ditentukan
- Target akhir Renstra tahun 2022 sebesar 15

Meski Capaian Kinerja Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2022 belum 100%, namun kinerja semakin membaik dibanding tahun sebelumnya dan diharapkan akan semakin meningkat pada tahun yang akan datang

3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4 Meningkatnya Daya Serap Anggaran dalam APBD

Tabel 3.1.4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RENSTRA (2022)	Target Nasional (jika ada)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Penyerapan Anggaran	Nilai Indeks	104,13	12,05	11,11	92,20	15,56	0

Sasaran 4 Meningkatnya Daya Serap Anggaran dalam APBD, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yakni :

1. Indeks Penyerapan Anggaran, formulasi perhitungan : **Realisasi / Target di kali 100%**

Adapun Capaian Kinerja sebagai berikut :

- Capaian Kinerja tahun 2022 sebesar 92,20%, pencapaiannya didapatkan dari realisasi sebesar 11,11 di bagi target 12,05 dikali 100%
- Perbandingan Capaian Kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 104,13%, turun sebesar 11,93% hal mana disebabkan turunnya realisasi penyerapan anggaran Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan pada tahun 2021 100% turun menjadi 86,6% di tahun 2022, hal ini pula yang menyebabkan Capaian Kinerja Indeks Penyerapan Anggaran tidak tercapai 100%
- Target akhir Renstra 2022 adalah sebesar 15,56.

Adapun Program yang mendukung ke 3 Indeks tersebut diatas adalah :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kekurangan pencapaian pernyataan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis Program Pengelolaan Keuangan Daerah :

Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas dan Berkinerja Tinggi	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tepat Waktu	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100$ $\frac{145,540,809,687}{159,623,438,026} \times 100$	Persen	90	91.18

Analisis Program yang mendukung keberhasilan dan kekurangan pencapaian sasaran 2 Meningkatnya Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, sebagai berikut :

1. Realisasi penyerapan keuangan : 91.18 % melampaui target : 90%, didapat dengan formulasi pengukuran Realisasi Anggaran : Target Anggaran di kali 100
2. Pencapaian realisasi tersebut meski melampaui dari target namun masih kurang dari yang diharapkan karena ada anggaran sub kegiatan yang tidak terealisasi secara maksimal hal mana disebabkan adanya perubahan anggaran serta adanya pengetatan anggaran kegiatan oleh Tim Pengendali Keuangan Daerah.

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi
Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan Anggaran Daerah	Jumlah Keseluruhan Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	Dok	171	171 Dok. tercapai pada Triwulan III
Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	Jumlah Lap. Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Keseluruhan Lap Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Lap	135	118 Lap tercapai pada Triwulan IV

Daerah		Daerah				
Tersedianya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Keseluruhan Dokumen Hasil Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dok	33	33 Dok tercapai pada Triwulan IV
Tersedianya Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Lap. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Keseluruhan Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Lap	600	600 Laporan tercapai pada Triwulan IV

Analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing uraian kegiatan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah, dengan target 171 dokumen tercapai 100% pada triwulan III.

Out Put : Dokumen KUA PPAS Pokok dan Perubahan, Verifikasi RKA Pokok dan Perubahan, Verifikasi DPA Pokok dan Perubahan, Perda tentang APBD Pokok dan Perubahan, Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Perencanaan Pembiayaan.

2. Sasaran Kegiatan Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan target 135 Laporan tercapai 87,41% pada Triwulan IV

Out Put :

3. Sasaran Kegiatan Tersedianya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan target 33 Dokumen tercapai 100% pada Triwulan IV

Out Put : Verifikasi Dokumen SP2D, Neraca, LO

4. Sasaran Kegiatan Tersedianya Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan target 600 Laporan tercapai 100% pada Triwulan IV

Out Put : Tersalurnya bantuan keuangan ke Perangkat daerah atau organisasi pengusul secara tepat waktu.

2. Analisis Program Pengelolaan Barang Milik Daerah :

Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi
Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Tertib	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang tertib tata kelola BMD}}{\text{Total PD}} \times 100$ $\frac{40}{40} \times 100$	Persen	100	100

Analisis Program yang mendukung keberhasilan dan kekurangan pencapaian sasaran 2 Meningkatkan Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, sebagai berikut :

1. Realisasi terwujudnya tata Kelola Barang Milik Daerah yang tertib : 100% , mencapai target didapat dengan formulasi pengukuran Jumlah PD yang tertib tata Kelola Barang Milik Daerah : Total PD dikali 100
2. Pencapaian realisasi tersebut disebabkan semakin tertibnya semua Perangkat Daerah menata dan mengelola aset Barang Milik Daerah mereka.
3. Meskipun ada anggaran sub kegiatan yang tidak terealisasi 100 persen yang disebabkan adanya perubahan anggaran tapi tidak berpengaruh pada pencapaian kinerja bidang yang menangani pengelolaan Barang Milik Daerah.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2,3 dan 4 berdasarkan Sumber Daya Keuangan

1) Analisis Sumber Daya Keuangan Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis ini ditunjang dengan sumber daya anggaran pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3 : Sumber Daya Keuangan Program Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	SUMBER DAYA KEUANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	159,623,438,026	145,540,809,687	14,082,628,339	91.18
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	674,200,000	540,934,000	133,266,000	80.23
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	14,330,000	12,265,000	2,065,000	85.59
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	14,365,000	14,365,000	-	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	4,348,000		4,348,000	-
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	8,628,000		8,628,000	-
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	9,123,000	4,348,000	4,775,000	47.66
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	9,050,000	4,200,000	4,850,000	46.41
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	245,699,000	214,079,000	31,620,000	87.13
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	181,557,000	169,837,000	11,720,000	93.54
	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	102,004,000	76,004,000	26,000,000	74.51
	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	50,360,000	40,400,000	9,960,000	80.22
	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	34,736,000	5,436,000	29,300,000	15.65
2	Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	695,172,600	661,108,082	34,064,518	95.10
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	44,778,000	40,269,000	4,509,000	89.93
	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	20,840,000	19,796,000	1,044,000	94.99
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	57,880,000	57,172,600	707,400	98.78
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	196,682,600	177,381,474	19,301,126	90.19
	Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	67,630,000	64,483,800	3,146,200	95.35

	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	289,182,000	288,245,208	936,792	100
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	18,180,000	13,760,000	4,420,000	75.69
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	727,342,200	664,931,176	62,411,024	91.42
	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	31,750,000	31,540,000	210,000	99.34
	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	90,196,100	87,874,100	2,322,000	97.43
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	325,567,200	325,484,800	82,400	99.97
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota	95,545,900	91,132,080	4,413,820	95.38
	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah Daerah	38,007,000	33,952,000	4,055,000	89.33
	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	37,697,000	-	37,697,000	-
	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah kabupaten /kota	108,579,000	94,948,196	13,630,804	87.45
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	152,654,937,300	143,673,836,429	8,981,100,871	94.12
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	152,654,937,300	143,673,836,429	8,981,100,871	94.12

Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran 2 Meningkatnya Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Indikator 1,2, dan 3 adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. **145,540,809,687** dari pagu yang ditentukan Rp. **159,623,438,026** atau persentase sebesar **91.18** %. Terdapat sisa

anggaran sebesar Rp. **14,082,628,339** atau persentase **8.82%** dari persentase pagu yang ditentukan.

Adapun output dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

1. Tersusunnya KUA dan PPAS SKPD Pokok dan Perubahan, RKA SKPD Pokok dan Perubahan, DPA SKPD Pokok dan Perubahan, Perda APBD dan Perda APBD Perubahan, Perbup tentang Penjabatan APBD Pokok dan Perubahan.
2. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
3. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
4. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
5. Terlaksananya Pengelolaan Kas Daerah, Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD dan Kabupaten.
6. Terlaksananya Rekonsiliasi dan verifikasi SP2D SKPD, terlaksananya penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maros.
7. Terlaksananya penyaluran Hibah dan Bantuan Keuangan ke Perangkat Daerah atau Organisasi pengusul.

2) Analisis Sumber Daya Keuangan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Analisis ini ditunjang dengan sumber daya anggaran pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.1.4 : Sumber Daya Keuangan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO	SUMBER DAYA KEUANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
III	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4,871,785,926	3,807,308,180	1,064,477,746	78.15
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4,871,785,926	3,807,308,180	1,064,477,746	78.15
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	38,123,000	38,123,000	-	100
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD	41,263,000	40,833,000	430,000	98.96
	Penatausahaan BMD	50,941,500	50,586,500	355,000	99.30
	Inventarisasi BMD	48,244,000	47,694,000	550,000	98.86

Pengamanan BMD	44,294,500	8,070,000	36,224,500	18.22
Penilaian Barang Milik Daerah	4,342,536,526	3,370,096,000	972,440,526	77.61
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	27,695,500		27,695,500	-
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	39,360,500	24,865,500	14,495,000	63.17
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	70,039,000	60,149,000	9,890,000	85.88
Penyusunan Laporan BMD	54,586,500	53,973,500	613,000	98.88
Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten/Kota	114,701,900	112,917,680	1,784,220	98.44

Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran 2 Meningkatnya Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Indikator 1,3 adalah sebesar Rp. **4,871,785,926** yang terealisasi sebesar Rp. **3,807,308,180** atau **78.15%** dan terdapat sisa sebesar Rp. **1,064,477,746** atau **21,85%** dari Pagu yang ditentukan.

Outputnya adalah :

1. Tersusunnya RKBMD, terselenggaranya panatusahaan Barang Milik Daerah
2. Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan barang Milik Daerah
3. Terlaksananya Penatusahaan Barang Milik Daerah
4. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Terlaksananya Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah secara tertib
6. Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

3) Analisis Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Analisis ini sesuai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD anaudited Tahun 2022 seperti tertuang pada tabel berikut :

URAIAN	REALISASI 2021	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1.241.190.625.266,47	1.517.257.948.614	1.486.324.304.898,16	97,96
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93.401.063.233,47	300.275.072.614	266.637.121.347,16	88,80
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.969.088.837,80	10.487.620.496	10.859.311.136,65	103,54

Lain-lain PAD yang Sah	70.763.959.831,00	109.843.303.960	86.383.339.482,38	78,64
Dana Perimbangan	898.036.293.199,00	1.033.266.400.000	1.016.183.947.388,00	98,35
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	31.623.175.559,00	27.021.597.000	36.111.371.304,00	133,64
Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum (DAU)	660.026.786.000,00	659.108.296.000	658.690.796.000,00	99,94
Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	84.386.111.012,00	150.458.557.000	137.357.898.503,00	91,29
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	122.000.220.628,00	196.677.950.000	184.023.881.581,00	93,57
Dana Insentif Daerah (DID)	35.840.162.000,00	18.413.677.000	18.413.677.000,00	100,00
Dana Desa	88.510.353.000,00	80.501.940.000	80.501.940.000,00	100,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	124.350.515.000,00	98.915.617.000	98.915.617.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.352.911.738,00	72.904.453.000	91.332.213.163,00	125,28
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58.049.842.096,00	11.896.406.000	13.255.406.000,00	111,42
Pendapatan Hibah	1.443.000.000,00	11.896.406.000	13.255.406.000,00	111,42
Lain-lain Pendapatan	56.606.842.096,00	0	0,00	0,00
Pendapatan Hibah Dana BOS	48.923.212.338,00	0	0,00	0,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	7.683.629.758,00	0	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.241.190.625.266,47	1.517.257.948.614	1.486.324.304.898,16	97,96
BELANJA DAERAH	1.359.117.433.392,00	1.558.038.658.286	1.435.670.137.122,00	92,15
BELANJA OPERASI	891.337.597.668,00	1.028.982.590.406	961.659.330.613,00	93,46
Belanja Pegawai	599.570.057.473,00	605.101.876.840	569.611.005.635,00	94,13
Belanja Barang	63.028.515.716,00	103.612.961.967	86.445.329.329,00	83,43
Belanja Jasa	109.431.671.210,00	124.761.124.389	113.312.211.898,00	90,82
Belanja Hibah	13.778.582.672,00	15.511.131.000	14.917.925.951,00	96,18
BELANJA MODAL	310.623.327.290,00	376.239.383.080	327.524.592.440,00	87,05
JUMLAH BELANJA MODAL	310.623.327.290,00	376.239.383.080	327.524.592.440,00	87,05
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.064.964.400,00	3.800.000.000	2.812.377.640,00	74,01
BELANJA TRANSFER	156.091.544.034,00	149.016.684.800	143.673.836.429,00	96,41
Belanja Bantuan Keuangan	156.091.544.034,00	149.016.684.800	143.673.836.429,00	96,41
JUMLAH BELANJA	1.359.117.433.392,00	1.558.038.658.286	1.435.670.137.122,00	92,15
SURPLUS/DEFISIT	(117.926.808.125,53)	(40.780.709.672)	50.654.167.776,16	(124,21)
PEMBIAYAAN DAERAH	40.285.438.878,00	39.857.009.672	0,00	0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.285.438.878,00	39.857.009.672	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.285.438.878,00	39.857.009.672	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	40.285.438.878,00	39.857.009.672	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(77.641.369.247,53)	(923.700.000)	50.654.167.776,16	(5.483,83)

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 1.486.324.304.898,16** dari total anggaran sebesar **Rp. 1.517.257.948.614**, mengalami kenaikan capaian realisasi 97,96% dibandingkan total anggaran sebesar **Rp. 1.241.190.625.266,47** tahun 2021. Hal ini berarti adanya kenaikan pencapaian target seiring pertumbuhan ekonomi yang sudah semakin baik dari tahun sebelumnya sebesar **Rp. 30.933.643.715,8** atau sebesar **2,038%**.

Sedangkan realisasi belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada tahun 2022 sebesar **Rp. 1.435.670.137.122** atau **92,15 %** dari pagu **Rp. 1.558.038.658.286**, hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran belanja sebesar **Rp.122.368.521.164** atau **7.85%** dari pagu yang ditentukan.

4). Analisis Sumber Pembiayaan

Secara proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di kelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros selaku SKPD Tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

No.	URAIAN	ALOKASI
1	PENDAPATAN DAERAH	1.517.257.948.614
	Pendapatan Asli Daerah	300.275.072.614
	Dana Perimbangan	1.033.266.400.000
	Pendapatan Transfer	98.915.617.000
	Lain-Lain PAD yang Sah	109.843.303.960
2	BELANJA DAERAH	1.558.038.658.286
	Belanja Operasi	1.028.982.590.406
	Belanja Modal	376.239.383.080
	Belanja Tidak Terduga	3.800.000.000
	Belanja Transfer	149.016.684.800
	SURPLUS/ (DEFISIT)	40.780.709.672

5) Analisis Capaian Realisasi Anggaran

Adapun capaian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut ini :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	1.246.270.496.496,00	1.224.695.204.758,03	98,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.287.620.496,00	18.124.896.068,03	61,89
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.487.620.496,00	10.859.311.136,65	103,54
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.487.620.496,00	10.859.311.136,65	103,54
Lain-lain PAD yang Sah	18.800.000.000,00	7.265.584.931,38	38,65
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00	13.656.000,00	2,73
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	500.000.000,00	13.656.000,00	2,73
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00	507.000.000,00	101,40
Hasil Sewa BMD	500.000.000,00	507.000.000,00	101,40
Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	3.448.567.504,63	68,97
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	12.500.000.000,00	1.165.401.708,89	9,32
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	300.000.000,00	2.130.959.717,86	710,32
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	300.000.000,00	2.130.959.717,86	710,32
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.287.620.496,00	18.124.896.068,03	61,89
PENDAPATAN TRANSFER	1.205.086.470.000,00	1.193.314.902.690,00	99,02
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.132.182.017.000,00	1.101.982.689.507,00	97,33
Dana Perimbangan	1.033.266.400.000,00	1.003.067.072.507,00	97,08
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27.021.597.000,00	36.111.371.304,00	133,64
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.063.672.000,00	13.171.990.430,00	163,35

DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	10.159.679.000,00	10.159.679.000,00	100,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	190.428.000,00	200.472.187,00	105,27
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5.879.768.000,00	9.829.367.740,00	167,17
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	729.697.000,00	729.644.000,00	99,99
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	40.042.000,00	61.906.947,00	154,61
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	659.108.296.000,00	658.690.796.000,00	99,94
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	150.458.557.000,00	137.357.898.503,00	91,29
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.303.704.000,00	1.275.774.000,00	97,86
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.887.129.000,00	2.851.867.000,00	98,78
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.296.983.000,00	4.204.067.000,00	97,84
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler -Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler -Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler -Pelayanan Kefarmasian	2.820.126.000,00	2.738.214.944,00	97,10
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	9.002.392.000,00	8.187.680.837,00	90,95
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.286.623.000,00	1.257.600.000,00	97,74
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2.520.739.000,00	1.883.911.456,00	74,74
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	367.650.000,00	355.430.000,00	96,68
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	12.939.629.000,00	17.964.992.948,00	138,84
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar	16.883.068.000,00	15.499.515.519,00	91,81

Pembangunan Pertanian			
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	4.925.000.000,00	4.834.015.700,00	98,15
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.322.660.000,00	21.555.572.000,00	96,56
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan	7.920.000.000,00	7.688.279.000,00	97,07
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.602.855.000,00	6.430.055.750,00	97,38
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.078.250.000,00	5.078.250.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.444.233.000,00	3.292.182.000,00	95,59
DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan	6.615.625.000,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	4.677.513.000,00	3.875.216.000,00	82,85
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	28.405.166.000,00	26.174.774.349,00	92,15
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	6.159.212.000,00	2.210.500.000,00	35,89
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	196.677.950.000,00	170.907.006.700,00	86,90
DAK Non Fisik-BOS Reguler	57.633.560.000,00	48.759.336.925,00	84,60
DAK Non Fisik-TPG PNSD	93.229.223.000,00	84.517.670.160,00	90,66
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.662.000.000,00	1.395.750.000,00	83,98
DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.519.852.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.536.600.000,00	4.523.140.000,00	99,70
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	505.800.000,00	505.800.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	700.000.000,00	674.521.000,00	96,36
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.114.050.000,00	2.901.800.823,00	70,53
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	445.836.000,00	371.382.000,00	83,30
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	23.343.290.000,00	18.861.114.000,00	80,80
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	244.178.000,00	129.492.192,00	53,03
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.460.436.000,00	4.174.296.100,00	93,58
DAK Non Fisik-PK2UKM	2.631.216.000,00	2.604.310.500,00	98,98
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	950.709.000,00	921.579.000,00	96,94
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	336.314.000,00	74,44

DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	249.400.000,00	230.500.000,00	92,42
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.033.266.400.000,00	1.003.067.072.507,00	97,08
Dana Insentif Daerah (DID)	18.413.677.000,00	18.413.677.000,00	100,00
Dana Desa	80.501.940.000,00	80.501.940.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	98.915.617.000,00	98.915.617.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.904.453.000,00	91.332.213.183,00	125,28
Pendapatan Bagi Hasil	56.804.453.000,00	77.951.271.683,00	137,23
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	56.804.453.000,00	77.951.271.683,00	137,23
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.975.000.000,00	15.449.285.965,00	140,77
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.148.000.000,00	13.274.629.541,00	109,27
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.871.953.000,00	28.322.594.288,00	158,48
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	95.000.000,00	142.142.290,00	149,62
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.714.500.000,00	20.762.619.599,00	132,12
Bantuan Keuangan	16.100.000.000,00	13.380.941.500,00	83,11
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	16.100.000.000,00	13.380.941.500,00	83,11
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	72.904.453.000,00	91.332.213.183,00	125,28
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.205.086.470.000,00	1.193.314.902.690,00	99,02
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.896.406.000,00	13.255.406.000,00	111,42
Pendapatan Hibah	11.896.406.000,00	13.255.406.000,00	111,42
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	11.896.406.000,00	13.255.406.000,00	111,42
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.896.406.000,00	13.255.406.000,00	111,42
JUMLAH PENDAPATAN	1.246.270.496.496,00	1.224.695.204.758,03	98,27
BELANJA DAERAH	209.216.099.939,00	196.820.187.332,00	94,08
BELANJA OPERASI	51.831.625.613,00	46.600.777.051,00	89,91
Belanja Pegawai	22.214.407.728,00	18.312.165.008,00	82,43
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	20.440.811.833,00	16.671.848.720,00	81,56
Belanja Gaji Pokok PNS	2.732.106.894,00	2.698.634.580,00	98,77
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	285.579.432,00	281.194.417,00	98,46
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	212.333.000,00	203.650.000,00	95,91
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.015.000,00	21.015.000,00	100,00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	77.454.000,00	76.975.000,00	99,38
Belanja Tunjangan Beras ASN	181.107.936,00	179.167.080,00	98,93
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.200.195,00	2.907.595,00	90,86
Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.631,00	37.596,00	84,24
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.905.437.322,00	13.186.055.437,00	78,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.633.324,00	5.552.976,00	98,57
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.900.099,00	16.659.039,00	98,57
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.260.835.895,00	1.166.083.288,00	92,48
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.260.835.895,00	1.166.083.288,00	92,48
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	512.760.000,00	474.233.000,00	92,49
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	512.760.000,00	474.233.000,00	92,49
Belanja Barang dan Jasa	29.617.217.885,00	28.288.612.043,00	95,51
Belanja Barang Pakai Habis	3.997.498.000,00	3.585.225.509,00	89,69
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.921.278.800,00	1.918.405.209,00	99,85
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	348.380.100,00	310.128.900,00	89,02
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	351.161.100,00	274.953.600,00	78,30
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	52.500.000,00	28.000.000,00	53,33
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	261.908.000,00	251.167.000,00	95,90
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.053.500,00	665.800,00	63,20
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.570.000,00	8.570.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.946.500,00	28.674.000,00	99,06
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	834.490.000,00	643.831.000,00	77,15
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.600.000,00	9.390.000,00	97,81
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	136.510.000,00	68.340.000,00	50,06
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.100.000,00	23.100.000,00	100,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa	22.845.035.885,00	22.301.126.346,00	97,62
Belanja Jasa Kantor	22.109.315.485,00	21.749.235.546,00	98,37
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	116.200.000,00	79.600.000,00	68,50
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	221.100.000,00	221.100.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00	0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli	674.000.000,00	628.980.708,00	93,32
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	42.600.000,00	31.200.000,00	73,24
Belanja Jasa Tenaga Caraka	18.000.000,00	9.000.000,00	50,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	12.000.000,00	50,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.546.000,00	1.546.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	634.200.000,00	590.100.000,00	93,05
Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00
Belanja Tagihan Air	0,00	0,00	0,00
Belanja Tagihan Listrik	19.917.879.504,00	19.763.273.438,00	99,22
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	0,00	0,00
Belanja Paket/Pengiriman	700.000,00	400.000,00	57,14
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	446.089.981,00	401.235.400,00	89,94
Belanja Lembur	13.000.000,00	10.800.000,00	83,08
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	735.720.400,00	551.890.800,00	75,01
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	282.542.400,00	242.481.600,00	85,82
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	353.178.000,00	309.409.200,00	87,61
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	1.442.575.000,00	1.192.197.666,00	82,64
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.377.575.000,00	1.127.212.166,00	81,83
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.311.000.000,00	1.080.257.166,00	82,40
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.875.000,00	13.875.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.000.000,00	4.230.000,00	21,15
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.700.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	15.000.000,00	13.950.000,00	93,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	64.985.500,00	99,98
Belanja Pemeliharaan Bangunan	65.000.000,00	64.985.500,00	99,98

Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.332.109.000,00	1.210.062.522,00	90,84
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.219.649.000,00	1.112.832.522,00	91,24
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	98.060.000,00	82.880.000,00	84,52
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.400.000,00	14.350.000,00	99,65
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	51.831.625.613,00	46.600.777.051,00	89,91
BELANJA MODAL	4.767.789.526,00	3.734.749.000,00	78,33
Belanja Modal Tanah	4.326.789.526,00	3.354.349.000,00	77,53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	441.000.000,00	380.400.000,00	86,26
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	255.500.000,00	198.600.000,00	77,73
Belanja Modal Alat Kantor	55.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	500.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	55.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	200.000.000,00	198.600.000,00	99,30
Belanja Modal Mebel	200.000.000,00	198.600.000,00	99,30
Belanja Modal Komputer	185.500.000,00	181.800.000,00	98,01
Belanja Modal Komputer Unit	141.500.000,00	140.990.000,00	99,64
Belanja Modal Personal Computer	126.500.000,00	126.050.000,00	99,64
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00	14.940.000,00	99,60
Belanja Modal Peralatan Komputer	44.000.000,00	40.810.000,00	92,75
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	41.000.000,00	40.810.000,00	99,54
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.800.000.000,00	2.810.824.852,00	73,97
BELANJA TRANSFER	148.816.684.800,00	143.673.836.429,00	96,54
Belanja Bantuan Keuangan	148.816.684.800,00	143.673.836.429,00	96,54
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	148.816.684.800,00	143.673.836.429,00	96,54
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	68.314.744.800,00	63.171.896.429,00	92,47
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	80.501.940.000,00	80.501.940.000,00	100,00
JUMLAH BELANJA	209.216.099.939,00	196.820.187.332,00	94,08
SURPLUS/DEFISIT	1.037.054.396.557,00	1.027.875.017.426,03	99,11
PEMBIAYAAN DAERAH	39.857.009.672,00	39.857.009.672,00	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.857.009.672,00	39.857.009.672,00	100,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.025.306.919,00	20.025.306.919,00	100,00
Sisa Belanja Lainnya	19.831.702.753,00	19.831.702.753,00	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	19.783.268.393,00	19.783.268.393,00	100,00
Sisa Dana BOS	48.434.360,00	48.434.360,00	100,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.857.009.672,00	39.857.009.672,00	100,00

PEMBIAYAAN NETTO	39.857.009.672,00	39.857.009.672,00	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.076.911.406.229,00	1.067.732.027.098,03	99,15

Berdasarkan tabel capaian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros tahun 2022 tersebut diatas, capaian realisasi belanja rata-rata belum mencapai 100% seperti **Belanja Operasi : 89,91%**, **Belanja Modal : 78,33%**, **Belanja Tidak Terduga : 73,97%**, **Belanja Transfer : 96,54%** hal mana disebabkan karena ada beberapa anggaran pada sub kegiatan yang tidak terpakai dan pengetatan anggaran sehingga penyerapan anggaran tidak optimal, namun meskipun demikian pencapaian kinerja tetap tercapai sesuai target yang ditentukan.

Sedangkan berdasarkan analisis berdasarkan Sumber Pembiayaan dimana Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD, mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.620.823.944.839,42 yang terdiri dari Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.517.257.948.614 dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.558.038.658.286

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 sebagai Perangkat Daerah (PD) maupun sebagai SKPKD dapat dikategorikan “Tinggi”, karena hampir keseluruhan Capaian Kinerja Sasaran Rata-rata diatas 90%.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros pada tahun 2022 telah mengelola anggaran sebesar Rp. **209,216,099,939** yang meliputi : Belanja Operasi sebesar Rp. 51,831,625,613, Belanja Modal Rp. 4,767,789,526, Belanja Tidak Terduga Rp. 3,800,000,000 dan Belanja Transfer Rp. 148,816,684,800 . Alokasi dana tersebut digunakan untuk membiayai Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 sesuai DPAP BKAD Tahun 2022.

Sedangkan berdasarkan analisis berdasarkan Sumber Pembiayaan dimana Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD, mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **1,025,157,990,557** yang terdiri dari Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1,234,374,090,496 dan Belanja Daerah sebesar Rp. 209,216,099,939.

B. SARAN

Melihat analisis pada setiap sasaran indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022, terdapat kendala sehingga belum optimalnya pencapaian indikator kinerja. Untuk itu dalam rangka peningkatan kinerja perangkat daerah untuk tahun akan datang, maka perlu diambil langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Evaluasi berkala terkait pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna meningkatkan capaian indikator tujuan/ sasaran sesuai RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
2. Masing-masing bidang melakukan pengawasan / pengendalian internal serta meningkatkan kapasitas SDM aparatur guna mengawal capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditentukan;

3. Masing-masing pelaksanaan kegiatan agar lebih cermat dalam membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan / sub kegiatan sesuai anggaran kas sehingga penyerapan anggaran tercapai 100%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang, permasalahan dan solusi yang telah dirumuskan harus diupayakan diterapkan dalam perencanaan yang kongkrit. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik dan tepat sasaran.

Maros, 10 Januari 2023

Kepala BKAD Kabupaten Maros,



ANDI SAMSOPHYAN, SE, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19710903 199603 1 001

Lampiran :

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

PPKD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2022

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	PENDAPATAN DAERAH	1.517.257.948.614	1.486.324.304.898,16	97,96
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.275.072.614	266.637.121.347,16	88,80
4.1.01	Pajak Daerah	162.109.148.158	156.161.828.082,63	96,33
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.000.000.000	2.870.273.000,00	143,51
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.000.000.000	2.870.273.000,00	143,51
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	2.000.000.000	2.870.273.000,00	143,51
4.1.01.07	Pajak Restoran	15.000.000.000	17.472.393.503,63	116,48
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.000.000.000	17.472.393.503,63	116,48
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.000.000.000	17.472.393.503,63	116,48
4.1.01.08	Pajak Hiburan	800.000.000	876.423.043,00	109,55
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	800.000.000	876.423.043,00	109,55
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	800.000.000	876.423.043,00	109,55
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.300.000.000	1.310.903.617,00	100,84
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.300.000.000	1.310.903.617,00	100,84
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.300.000.000	1.310.903.617,00	100,84
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	31.000.000.000	31.846.602.165,00	102,73
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	31.000.000.000	31.846.602.165,00	102,73
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	31.000.000.000	31.846.602.165,00	102,73
4.1.01.11	Pajak Parkir	14.000.000.000	11.870.669.700,00	84,79
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	14.000.000.000	11.870.669.700,00	84,79
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	14.000.000.000	11.870.669.700,00	84,79
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	800.000.000	789.792.080,00	98,72
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	800.000.000	789.792.080,00	98,72
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	800.000.000	789.792.080,00	98,72
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	11.620.000,00	38,73
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	11.620.000,00	38,73
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	11.620.000,00	38,73
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	26.179.148.158	13.316.358.606,00	50,87
4.1.01.14.19	Pajak Marmer	26.179.148.158	13.316.358.606,00	50,87
4.1.01.14.19.0001	Pajak Marmer	26.179.148.158	13.316.358.606,00	50,87

4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	28.000.000.000	21.505.775.885,00	76,81
4.1.01.15.01	PBBP2	28.000.000.000	21.505.775.885,00	76,81
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	28.000.000.000	21.505.775.885,00	76,81
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	43.000.000.000	54.291.016.483,00	126,26
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	43.000.000.000	54.291.016.483,00	126,26
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	43.000.000.000	54.291.016.483,00	126,26
4.1.02	Retribusi Daerah	17.835.000.000	13.232.642.645,50	74,19
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.240.000.000	3.763.286.030,00	71,82
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.000.000	119.692.000,00	239,38
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	50.000.000	119.692.000,00	239,38
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000	9.990.000,00	99,90
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000	9.990.000,00	99,90
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000	735.092.000,00	105,01
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000	735.092.000,00	105,01
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.950.000.000	2.480.912.030,00	62,81
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	3.950.000.000	2.480.912.030,00	62,81
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	30.000.000	64.020.000,00	213,40
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	30.000.000	64.020.000,00	213,40
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000	353.580.000,00	70,72
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000	353.580.000,00	70,72
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	9.595.000.000	5.857.508.500,00	61,05
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	300.000.000	257.688.000,00	85,90
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	300.000.000	257.688.000,00	85,90
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	500.000.000	399.476.500,00	79,90
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	500.000.000	399.476.500,00	79,90
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	140.000.000	7.800.000,00	5,57
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	140.000.000	7.800.000,00	5,57
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	305.000.000	259.995.000,00	85,24
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	305.000.000	259.995.000,00	85,24
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.350.000.000	4.932.549.000,00	59,07
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.350.000.000	4.932.549.000,00	59,07
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.000.000.000	3.611.848.115,50	120,39
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.000.000.000	3.611.848.115,50	120,39
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	3.000.000.000	3.611.848.115,50	120,39
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.487.620.496	10.859.311.136,65	103,54
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.487.620.496	10.859.311.136,65	103,54
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada	0	0,00	0,00

	BUMD (Lembaga Keuangan)			
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0	0,00	0,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	10.487.620.496	10.859.311.136,65	103,54
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	10.487.620.496	10.859.311.136,65	103,54
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	109.843.303.960	86.383.339.482,38	78,64
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000	13.656.000,00	2,73
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0	0,00	0,00
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	500.000.000	13.656.000,00	2,73
4.1.04.01.06.0001	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0	0,00	0,00
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	500.000.000	13.656.000,00	2,73
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	970.000.000	848.700.000,00	87,49
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	970.000.000	848.700.000,00	87,49
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	970.000.000	848.700.000,00	87,49
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000	3.448.567.504,63	68,97
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000	3.448.567.504,63	68,97
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000	3.448.567.504,63	68,97
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0	0,00	0,00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0	0,00	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	12.500.000.000	942.374.483,89	7,54
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	12.500.000.000	942.374.483,89	7,54
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	12.500.000.000	942.374.483,89	7,54
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0,00	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0,00	0,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	300.000.000	2.227.791.628,86	742,60
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	300.000.000	2.227.791.628,86	742,60
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	300.000.000	2.227.791.628,86	742,60
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0	0,00	0,00
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	90.573.303.960	78.902.249.865,00	87,11
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	90.573.303.960	78.902.249.865,00	87,11
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	90.573.303.960	78.902.249.865,00	87,11

4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0	0,00	0,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0	0,00	0,00
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.275.072.614	266.637.121.347,16	88,80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.205.086.470.000	1.206.431.777.551,00	100,11
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.132.182.017.000	1.115.099.564.388,00	98,49
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.033.266.400.000	1.016.183.947.388,00	98,35
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27.021.597.000	36.111.371.304,00	133,64
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.063.672.000	13.171.990.430,00	163,35
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	10.159.679.000	10.159.679.000,00	100,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	190.428.000	200.472.187,00	105,27
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5.879.768.000	9.829.367.740,00	167,17
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	729.697.000	729.644.000,00	99,99
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	40.042.000	61.906.947,00	154,61
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000	1.958.311.000,00	100,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	659.108.296.000	658.690.796.000,00	99,94
4.2.01.01.02.0001	DAU	659.108.296.000	658.690.796.000,00	99,94
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	150.458.557.000	137.357.898.503,00	91,29
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.303.704.000	1.275.774.000,00	97,86
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.887.129.000	2.851.867.000,00	98,78
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.296.983.000	4.204.067.000,00	97,84
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.820.126.000	2.738.214.944,00	97,10
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	9.002.392.000	8.187.680.837,00	90,95
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.286.623.000	1.257.600.000,00	97,74
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2.520.739.000	1.883.911.456,00	74,74
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	367.650.000	355.430.000,00	96,68
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0	0,00	0,00

4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	12.939.629.000	17.964.992.948,00	138,84
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	16.883.068.000	15.499.515.519,00	91,81
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	4.925.000.000	4.834.015.700,00	98,15
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.322.660.000	21.555.572.000,00	96,56
4.2.01.01.03.0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan	7.920.000.000	7.688.279.000,00	97,07
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.602.855.000	6.430.055.750,00	97,38
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.078.250.000	5.078.250.000,00	100,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.444.233.000	3.292.182.000,00	95,59
4.2.01.01.03.0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan	6.615.625.000	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	4.677.513.000	3.875.216.000,00	82,85
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	28.405.166.000	26.174.774.349,00	92,15
4.2.01.01.03.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	6.159.212.000	2.210.500.000,00	35,89
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	196.677.950.000	184.023.881.581,00	93,57
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	57.633.560.000	55.624.992.421,00	96,51
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	93.229.223.000	84.517.670.160,00	90,66
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.662.000.000	1.395.750.000,00	83,98
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.519.852.000	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.536.600.000	4.523.140.000,00	99,70
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	505.800.000	505.800.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	700.000.000	700.000.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.114.050.000	4.114.050.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	445.836.000	445.836.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	23.343.290.000	23.343.290.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	244.178.000	244.178.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.460.436.000	4.460.436.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.631.216.000	2.631.216.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	950.709.000	950.709.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan	451.800.000	336.314.000,00	74,44

	Perempuan dan Anak			
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	249.400.000	230.500.000,00	92,42
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.033.266.400.000	1.016.183.947.388,00	98,35
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	18.413.677.000	18.413.677.000,00	100,00
4.2.01.02.01	DID	18.413.677.000	18.413.677.000,00	100,00
4.2.01.02.01.0001	DID	18.413.677.000	18.413.677.000,00	100,00
4.2.01.05	Dana Desa	80.501.940.000	80.501.940.000,00	100,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	80.501.940.000	80.501.940.000,00	100,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	80.501.940.000	80.501.940.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	98.915.617.000	98.915.617.000,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.904.453.000	91.332.213.163,00	125,28
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	56.804.453.000	77.951.271.663,00	137,23
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	56.804.453.000	77.951.271.663,00	137,23
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.975.000.000	15.449.285.965,00	140,77
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.148.000.000	13.274.629.541,00	109,27
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.871.953.000	28.322.594.288,00	158,48
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	95.000.000	142.142.270,00	149,62
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.714.500.000	20.762.619.599,00	132,12
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	16.100.000.000	13.380.941.500,00	83,11
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	16.100.000.000	13.380.941.500,00	83,11
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	16.100.000.000	13.380.941.500,00	83,11
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0	0,00	0,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	72.904.453.000	91.332.213.163,00	125,28
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.205.086.470.000	1.206.431.777.551,00	100,11
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.896.406.000	13.255.406.000,00	111,42
4.3.01	Pendapatan Hibah	11.896.406.000	13.255.406.000,00	111,42
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	11.896.406.000	13.255.406.000,00	111,42
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	11.896.406.000	13.255.406.000,00	111,42
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	11.896.406.000	13.255.406.000,00	111,42
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00	0,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0	0,00	0,00
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0	0,00	0,00
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	0	0,00	0,00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0	0,00	0,00

4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.896.406.000	13.255.406.000,00	111,42
	JUMLAH PENDAPATAN	1.517.257.948.614	1.486.324.304.898,16	97,96
5	BELANJA DAERAH	1.558.038.658.286	1.435.670.137.122,00	92,15
5.1	BELANJA OPERASI	1.028.982.590.406	961.659.330.613,00	93,46
5.1.01	Belanja Pegawai	605.101.876.840	569.611.005.635,00	94,13
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	425.669.191.610	408.536.761.726,00	95,98
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	323.260.201.873	313.533.792.960,00	96,99
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	314.944.716.410	306.657.227.660,00	97,37
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	8.315.485.463	6.876.565.300,00	82,70
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	28.815.477.881	27.470.307.452,00	95,33
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	27.915.798.256	26.980.510.754,00	96,65
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	899.679.625	489.796.698,00	54,44
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.951.226.875	7.614.413.440,00	95,76
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.951.226.875	7.614.413.440,00	95,76
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0	0,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.847.172.275	19.360.056.000,00	97,55
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	19.847.172.275	19.360.056.000,00	97,55
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.984.059.645	6.590.175.000,00	94,36
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.467.719.270	6.169.210.000,00	95,38
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	516.340.375	420.965.000,00	81,53
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	18.300.758.785	17.472.411.300,00	95,47
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.632.408.782	17.062.296.840,00	96,77
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	668.350.003	410.114.460,00	61,36
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	634.861.644	607.994.763,00	95,77
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	634.861.644	607.994.763,00	95,77
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.943.049	4.312.197,00	72,56
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.069.937	4.205.444,00	82,95
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	873.112	106.753,00	12,23
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.905.437.322	13.186.055.437,00	78,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.905.437.322	13.186.055.437,00	78,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	724.310.807	645.010.605,00	89,05
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	704.525.274	629.654.309,00	89,37
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	19.785.533	15.356.296,00	77,61
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.122.541.454	1.935.032.572,00	91,17
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.064.433.458	1.888.965.488,00	91,50
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	58.107.996	46.067.084,00	79,28
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus	117.200.000	117.200.000,00	100,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus	117.200.000	117.200.000,00	100,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	44.967.199.782	40.255.211.223,00	89,52

5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	44.967.199.782	40.255.211.223,00	89,52
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	44.967.199.782	40.255.211.223,00	89,52
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	112.536.700.840	99.712.253.544,00	88,60
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.560.925.000	2.560.450.000,00	99,98
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	31.200.000	31.200.000,00	100,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	234.000.000	234.000.000,00	100,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	23.400.000	23.400.000,00	100,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	38.025.000	38.025.000,00	100,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	483.600.000	483.600.000,00	100,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	85.000.000	84.700.000,00	99,65
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	23.400.000	23.400.000,00	100,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	175.000	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.642.125.000	1.642.125.000,00	100,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	382.125.000	30.000.000,00	7,85
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	10.000.000	10.000.000,00	100,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	31.250.000	20.000.000,00	64,00
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	15.000.000	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	12.750.000	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	313.125.000	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	97.734.592.240	88.520.110.180,00	90,57
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	97.734.592.240	88.520.110.180,00	90,57
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.863.698.600	100.791.000,00	5,41
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	1.863.698.600	100.791.000,00	5,41
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.709.250.000	920.250.000,00	53,84
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.709.250.000	920.250.000,00	53,84
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0	0,00	0,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.286.110.000	7.580.652.364,00	91,49
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.796.710.000	5.442.572.364,00	93,89
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.200.000	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja	2.488.200.000	2.138.080.000,00	85,93

	Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.069.636.284	15.020.466.782,00	99,67
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000	782.040.000,00	100,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000	782.040.000,00	100,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	74.529.000	74.529.000,00	100,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	74.529.000	74.529.000,00	100,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	81.000.000	81.000.000,00	100,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	81.000.000	81.000.000,00	100,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000	67.032.000,00	100,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000	67.032.000,00	100,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000	1.133.958.000,00	100,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000	1.133.958.000,00	100,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	108.341.100	108.341.100,00	100,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	108.341.100	108.341.100,00	100,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000	4.410.000.000,00	100,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000	4.410.000.000,00	100,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000	1.102.500.000,00	100,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000	1.102.500.000,00	100,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	39.102.000	39.102.000,00	100,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	39.102.000	39.102.000,00	100,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.676.082.284	2.676.082.284,00	100,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.608.768	1.608.768,00	100,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.826.304	4.826.304,00	100,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.669.647.212	2.669.647.212,00	100,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.545.882.398	4.545.882.398,00	100,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.545.882.398	4.545.882.398,00	100,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	49.169.502	0,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	49.169.502	0,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.067.548.324	901.607.360,00	84,46
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000	54.600.000,00	100,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000	54.600.000,00	100,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	1.008.000	1.008.000,00	100,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	1.008.000	1.008.000,00	100,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	98.280.000,00	100,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	98.280.000,00	100,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520	3.476.160,00	85,71
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520	3.476.160,00	85,71
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.070.244	1.042.720,00	97,43
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.070.244	1.042.720,00	97,43

5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400	1.200,00	85,71
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400	1.200,00	85,71
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040	112.320,00	85,71
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040	112.320,00	85,71
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120	336.960,00	85,71
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120	336.960,00	85,71
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	743.009.000	742.750.000,00	99,97
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	8.800.000	8.800.000,00	100,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	66.000.000	66.000.000,00	100,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	6.600.000	6.600.000,00	100,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	10.934.500	10.725.000,00	98,08
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	136.400.000	136.400.000,00	100,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	24.750.000	24.750.000,00	100,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	6.600.000	6.600.000,00	100,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	49.500	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	482.875.000	482.875.000,00	100,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	165.000.000	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	49.375.000	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	6.250.000	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	109.375.000	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000	801.600.000,00	100,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000	201.600.000,00	100,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000	201.600.000,00	100,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000	600.000.000,00	100,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000	600.000.000,00	100,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	0	0,00	0,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	0	0,00	0,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	0	0,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	4.990.000.000	4.383.105.000,00	87,84
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	4.990.000.000	4.383.105.000,00	87,84
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	4.990.000.000	4.383.105.000,00	87,84
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.369.582.566	377.130.399.027,00	92,35
5.1.02.01	Belanja Barang	103.612.961.967	86.445.329.329,00	83,43
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	103.612.961.967	86.445.329.329,00	83,43

5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	440.190.500	373.180.500,00	84,78
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	356.500.000	310.000.000,00	86,96
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.709.988.475	3.670.810.384,00	98,94
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	0	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	43.700.000	43.700.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.177.833.877	5.936.351.650,00	82,70
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	45.000.000	30.000.000,00	66,67
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	53.515.000	26.335.000,00	49,21
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.736.269.439	2.955.465.067,00	79,10
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	560.000	520.000,00	92,86
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.513.102.330	4.490.896.867,00	68,95
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	234.496.000	193.534.002,00	82,53
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.844.430.500	1.356.895.500,00	73,57
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	679.986.600	650.454.900,00	95,66
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	333.040.528	264.415.281,00	79,39
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	270.150.000	227.900.000,00	84,36
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	19.120.000	12.745.000,00	66,66
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	635.100.000	566.700.000,00	89,23
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.409.646.601	1.119.087.700,00	79,39
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.790.100.372	3.718.027.410,00	98,10
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.296.164.194	5.686.816.098,00	90,32
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	28.737.500.000	23.599.130.052,00	82,12
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	8.400.000.000	8.164.577.000,00	97,20
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.860.000.000	1.860.000.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.838.819.551	12.030.800.818,00	75,96
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.680.120.000	2.546.050.000,00	95,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	5.438.550.000	3.915.063.600,00	71,99
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	279.800.000	186.490.000,00	66,65
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	299.720.000	296.940.000,00	99,07
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	390.000.000	390.000.000,00	100,00

5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	29.500.000	29.500.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	146.150.000	139.212.500,00	95,25
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	90.000.000	80.102.500,00	89,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	198.400.000	185.153.250,00	93,32
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	338.510.000	320.620.000,00	94,72
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	86.650.000	83.666.250,00	96,56
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	40.000.000	40.000.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	13.500.000	13.500.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	58.445.000	41.300.000,00	70,66
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	9.350.000	9.350.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	221.750.000	194.750.000,00	87,82
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	318.223.000	274.503.000,00	86,26
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	369.100.000	242.350.000,00	65,66
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	80.730.000	80.715.000,00	99,98
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	99.250.000	87.720.000,00	88,38
5.1.02.02	Belanja Jasa	124.761.124.389	113.312.211.898,00	90,82
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	95.546.253.376	87.581.476.043,00	91,66
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.364.150.000	2.773.499.000,00	63,55
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	975.940.000	726.940.000,00	74,49
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	36.000.000	5.400.000,00	15,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	89.200.000	89.200.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	96.000.000	96.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	504.088.000	333.042.000,00	66,07
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	221.100.000	221.100.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.780.345.000	5.157.000.000,00	89,22
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.380.212.649	6.263.810.475,00	66,78
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	59.200.000	57.200.000,00	96,62
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	91.800.000	90.300.000,00	98,37
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	30.000.000	21.000.000,00	70,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.290.750.000	1.290.000.000,00	99,94
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	539.400.000	533.300.000,00	98,87
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	627.000.000	617.500.000,00	98,48
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	325.200.000	315.600.000,00	97,05
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	360.000.000	360.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	461.200.000	446.280.000,00	96,76
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	214.000.000	214.000.000,00	100,00

5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	535.700.000	528.650.000,00	98,68
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.774.890.000	1.714.350.000,00	96,59
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.252.850.000	8.115.800.000,00	98,34
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.056.550.992	4.517.416.700,00	89,34
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.035.490.000	8.985.740.000,00	99,45
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.581.400.000	4.538.650.000,00	99,07
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	264.150.000	251.700.000,00	95,29
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.689.800.000	1.663.750.000,00	98,46
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	0	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	660.222.000	637.822.000,00	96,61
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	200.000.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	23.500.000	13.200.000,00	56,17
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.663.750.000	1.595.550.000,00	95,90
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	18.000.000	14.750.400,00	81,95
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	200.000.000	197.035.000,00	98,52
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	819.533.000	747.805.000,00	91,25
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.295.006.000	1.294.002.900,00	99,92
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	85.500.000	64.500.000,00	75,44
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	75.600.000	60.284.981,00	79,74
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	41.951.000	2.186.500,00	5,21
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	20.081.797.004	19.812.550.539,00	98,66
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.182.315.000	4.098.540.000,00	98,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.946.258.800	7.773.907.040,00	97,83
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	21.200.800	400.000,00	1,89
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	208.000.000	149.000.680,00	71,63
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	446.089.981	401.235.400,00	89,94
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	284.233.150	234.693.528,00	82,57
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	254.880.000	230.250.000,00	90,34
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	402.000.000	326.533.900,00	81,23
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.729.062.800	19.872.524.170,00	95,87
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	17.277.540.000	17.277.536.000,00	100,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.515.262.400	1.955.158.200,00	77,73
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	120.540.000	8.400.000,00	6,97
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	282.542.400	242.481.600,00	85,82
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	353.178.000	309.409.200,00	87,61
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	180.000.000	79.539.170,00	44,19
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	76.458.000	69.000.000,00	90,25

5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	76.458.000	69.000.000,00	90,25
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	815.642.009	670.642.000,00	82,22
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	150.000.000	149.000.000,00	99,33
5.1.02.02.04.0011	Belanja Sewa Mesin Proses	7.500.000	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	120.292.000	110.442.000,00	91,81
5.1.02.02.04.0039	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	12.200.000	12.200.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	344.500.000	273.000.000,00	79,25
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	5.000.000	5.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	136.550.009	101.000.000,00	73,97
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	30.000.000	20.000.000,00	66,67
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	6.600.000	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0286	Belanja Sewa Alat Laboratorium Geofisika	3.000.000	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	0	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.361.932.000	2.342.558.000,00	69,68
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.925.032.000	1.970.658.000,00	67,37
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	84.000.000	84.000.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	6.500.000	6.500.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	13.000.000	5.000.000,00	38,46
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	260.000.000	210.000.000,00	80,77
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	27.700.000	20.700.000,00	74,73
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	45.700.000	45.700.000,00	100,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	129.500.000	67.500.000,00	52,12
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	122.000.000	60.000.000,00	49,18
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	7.500.000	7.500.000,00	100,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.135.775.204	1.595.125.699,00	74,69
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	385.050.000	382.626.000,00	99,37
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	223.380.500	139.800.000,00	62,58
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	16.800.000	8.994.000,00	53,54
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	219.400.000	214.407.000,00	97,72
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa	264.175.645	164.175.645,00	62,15

	Rekayasa Konstruksi			
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	83.800.000	82.745.000,00	98,74
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	158.700.000	98.256.300,00	61,91
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	737.469.059	457.821.754,00	62,08
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	47.000.000	46.300.000,00	98,51
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0	0,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	828.500.000	416.330.000,00	50,25
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	280.500.000	198.330.000,00	70,71
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	500.000.000	198.000.000,00	39,60
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	48.000.000	20.000.000,00	41,67
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	55.670.800	54.023.936,00	97,04
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	55.670.800	54.023.936,00	97,04
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	0	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.082.330.200	643.032.050,00	59,41
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	807.280.200	373.982.050,00	46,33
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	137.525.000	135.025.000,00	98,18
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	137.525.000	134.025.000,00	97,46
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.213.669.303	5.785.970.761,00	80,21
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	199.500.000	198.500.000,00	99,50
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0	0,00	0,00
5.1.02.03.01.0019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	199.500.000	198.500.000,00	99,50
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0	0,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.113.361.000	3.188.950.492,00	77,53
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	2.950.000	2.950.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	8.275.000	3.850.000,00	46,53
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	3.450.000	3.450.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	103.215.000	102.336.000,00	99,15
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	8.070.000	5.070.000,00	62,83

5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.821.000.000	1.478.404.010,00	81,19
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	45.000.000	23.500.000,00	52,22
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	149.827.500	149.827.500,00	100,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	8.000.000	5.500.000,00	68,75
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	27.235.000	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.600.000	3.600.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	44.020.000	25.499.000,00	57,93
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi			
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	50.000.000	49.978.000,00	99,96
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	376.380.500	247.068.825,00	65,64
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	445.278.000	374.657.400,00	84,14
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	95.550.000	77.510.000,00	81,12
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	32.000.000	31.993.507,00	99,98
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	18.500.000	6.000.000,00	32,43
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	10.000.000	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	500.000	500.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	9.000.000	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0217	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	100.000.000	99.900.000,00	99,90
5.1.02.03.02.0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat	4.430.000	4.212.500,00	95,09

	Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi			
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	149.880.000	120.673.750,00	80,51
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	89.500.000	88.400.000,00	98,77
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	33.800.000	17.080.000,00	50,53
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	129.250.000	126.550.000,00	97,91
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	31.650.000	27.050.000,00	85,47
	(Penggandaan)	10.000.000	10.000.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	105.000.000	79.890.000,00	76,09
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	198.000.000	23.500.000,00	11,87
5.1.02.03.02.0504	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	0	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0508	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara	0	0,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.750.908.303	2.256.706.269,00	82,03
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.426.435.849	979.640.415,00	68,68
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50.000.000	50.000.000,00	100,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	25.000.000	24.775.200,00	99,10
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	5.065.000	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	20.000.000	20.000.000,00	100,00
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	48.500.000	48.500.000,00	100,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	15.000.000	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	9.000.000	9.000.000,00	100,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	67.057.454	67.057.454,00	100,00

5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat			
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	350.000.000	326.200.000,00	93,20
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	160.000.000	159.501.000,00	99,69
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	200.000.000	199.490.000,00	99,75
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	75.000.000	74.751.000,00	99,67
5.1.02.03.03.0043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel	75.000.000	74.614.200,00	99,49
5.1.02.03.03.0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	50.000.000	50.000.000,00	100,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	24.850.000	24.850.000,00	100,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	149.900.000	141.814.000,00	94,61
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	52.900.000	52.900.000,00	100,00
5.1.02.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	8.000.000	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	70.000.000	69.914.000,00	99,88
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	19.000.000	19.000.000,00	100,00
5.1.02.03.04.0135	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM	0	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	52.962.171.300	39.127.736.541,00	73,88
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.962.171.300	39.127.736.541,00	73,88
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.933.040.300	20.803.884.541,00	83,44
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.170.000	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.963.861.000	15.859.052.000,00	63,53
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.063.100.000	2.464.800.000,00	80,47
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.008.210.000	10.652.980.000,00	96,77
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.982.350.000	9.937.150.000,00	99,55
5.1.02.05.01	Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	150.000.000	148.327.000,00	98,88
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	735.550.000	700.350.000,00	95,21
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	91.800.000	81.800.000,00	89,11
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	9.155.000.000	9.155.000.000,00	100,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.025.860.000	715.830.000,00	69,78
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	251.760.000	211.610.000,00	84,05
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	774.100.000	504.220.000,00	65,14

5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	47.250.672.296	65.418.773.578,00	138,45
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	47.250.672.296	65.418.773.578,00	138,45
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	47.250.672.296	65.418.773.578,00	138,45
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.560.773.311	56.387.396.920,00	91,60
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.560.773.311	56.387.396.920,00	91,60
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.560.773.311	56.387.396.920,00	91,60
5.1.05	Belanja Hibah	15.511.131.000	14.917.925.951,00	96,18
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.661.131.000	14.068.782.436,00	95,96
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	75.000.000,00	100,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	75.000.000,00	100,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.001.741.000	3.651.766.500,00	91,25
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	150.000.000	150.000.000,00	100,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.851.741.000	3.501.766.500,00	90,91
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.584.390.000	10.342.015.936,00	97,71
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.925.000.000	7.725.000.000,00	97,48
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.659.390.000	2.617.015.936,00	98,41
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	850.000.000	849.143.515,00	99,90
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	850.000.000	849.143.515,00	99,90
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	850.000.000	849.143.515,00	99,90
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.028.982.590.406	961.659.330.613,00	93,46
5.2	BELANJA MODAL	376.239.383.080	327.524.592.440,00	87,05
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.326.789.526	3.354.349.000,00	77,53
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	4.326.789.526	3.354.349.000,00	77,53
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	4.326.789.526	3.354.349.000,00	77,53
5.2.01.01.02.0002	Belanja Modal Tanah Kering	4.326.789.526	3.354.349.000,00	77,53
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.630.198.628	81.153.747.806,00	92,61
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.019.500.000	1.799.901.000,00	89,13
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	400.000.000	345.101.000,00	86,28
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	400.000.000	345.101.000,00	86,28
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	65.500.000	0,00	0,00
5.2.02.01.02.0005	Belanja Modal Mesin Proses Apung	65.500.000	0,00	0,00
5.2.02.01.02.0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	0	0,00	0,00

5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.554.000.000	1.454.800.000,00	93,62
5.2.02.01.03.0001	Belanja Modal Alat Penarik	1.500.000.000	1.450.800.000,00	96,72
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	54.000.000	4.000.000,00	7,41
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	0	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	0	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	0	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0	0,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.270.038.500	2.180.087.500,00	96,04
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.950.038.500	1.866.487.500,00	95,72
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	590.000.000	577.400.000,00	97,86
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	836.838.500	773.000.000,00	92,37
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	395.000.000	394.630.000,00	99,91
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	128.200.000	121.457.500,00	94,74
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	320.000.000	313.600.000,00	98,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	320.000.000	313.600.000,00	98,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0	0,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.761.350.000	2.581.659.000,00	93,49
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	117.000.000	98.400.000,00	84,10
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	117.000.000	98.400.000,00	84,10
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	8.800.000	0,00	0,00
5.2.02.03.02.0001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	0	0,00	0,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	5.200.000	0,00	0,00
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	3.600.000	0,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	2.635.550.000	2.483.259.000,00	94,22
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	2.525.000.000	2.373.876.000,00	94,01
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	110.550.000	109.383.000,00	98,94
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	158.500.000	158.000.000,00	99,68
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	158.500.000	158.000.000,00	99,68
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	158.500.000	158.000.000,00	99,68
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.179.905.220	18.393.280.196,00	91,15
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.738.463.065	4.279.499.366,00	90,31
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	5.000.000	5.000.000,00	100,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	500.000	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	125.000.000	63.250.000,00	50,60
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.607.963.065	4.211.249.366,00	91,39
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.392.242.155	14.080.780.830,00	91,48
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.290.376.000	4.427.345.010,00	83,69
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	701.972.500	657.472.500,00	93,66

5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	7.745.951.000	7.614.518.120,00	98,30
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	127.128.700	116.000.000,00	91,25
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.526.813.955	1.265.445.200,00	82,88
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	49.200.000	33.000.000,00	67,07
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	15.000.000	15.000.000,00	100,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.400.000	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	8.000.000	8.000.000,00	100,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4.800.000	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	19.000.000	10.000.000,00	52,63
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	624.500.000	595.836.999,00	95,41
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	105.500.000	105.500.000,00	100,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	20.000.000	20.000.000,00	100,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	85.500.000	85.500.000,00	100,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0	0,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	274.000.000	247.300.000,00	90,26
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	0	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	250.000.000	247.300.000,00	98,92
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	24.000.000	0,00	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	200.000.000	198.037.000,00	99,02
5.2.02.06.03.0046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	200.000.000	198.037.000,00	99,02
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	45.000.000	44.999.999,00	100,00
5.2.02.06.04.0003	Belanja Modal Distance Measuring Equipment (DME)	45.000.000	44.999.999,00	100,00
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0	0,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	28.371.322.463	27.219.290.985,00	95,94
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	27.054.822.483	25.942.440.985,00	95,89
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.726.722.483	5.641.163.703,00	98,51
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	14.003.800.000	13.004.151.866,00	92,86
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	320.800.000	320.800.000,00	100,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3.500.000	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	7.000.000.000	6.976.325.416,00	99,66
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.316.499.980	1.276.850.000,00	96,99
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.316.499.980	1.276.850.000,00	96,99
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	909.693.600	668.466.200,00	73,48

5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	714.310.000	668.466.200,00	93,58
5.2.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	26.540.000	21.650.000,00	81,57
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	63.000.000	56.335.500,00	89,42
5.2.02.08.01.0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	24.770.000	21.525.000,00	86,90
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	600.000.000	568.955.700,00	94,83
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	194.133.600	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	194.133.600	0,00	0,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	1.250.000	0,00	0,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	1.250.000	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.362.295.545	3.933.101.500,00	61,82
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.497.227.945	1.817.652.500,00	72,79
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	50.000.000	50.000.000,00	100,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.764.196.600	1.377.347.000,00	78,07
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	683.031.345	390.305.500,00	57,14
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.865.067.600	2.115.449.000,00	54,73
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	815.376.600	397.002.000,00	48,69
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	134.691.000	102.188.000,00	75,87
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.915.000.000	1.616.259.000,00	55,45
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0	0,00	0,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0	0,00	0,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	0	0,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0	0,00	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0	0,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	440.965.000	273.370.000,00	61,99
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	440.965.000	273.370.000,00	61,99
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	440.965.000	273.370.000,00	61,99
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.919.798.300	6.615.451.810,00	134,47
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.919.798.300	6.615.451.810,00	134,47
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.919.798.300	6.615.451.810,00	134,47
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	18.612.330.000	16.735.302.616,00	89,92
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	18.612.330.000	16.735.302.616,00	89,92
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	18.612.330.000	16.735.302.616,00	89,92
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.500.808.263	75.376.518.253,00	85,17
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	84.770.118.463	71.661.530.253,00	84,54
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	79.636.806.463	68.994.098.253,00	86,64
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	19.431.848.200	16.293.840.456,00	83,85
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	430.000.000	227.495.000,00	52,91
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	29.929.763.600	29.406.413.100,00	98,25
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.131.860.500	1.868.330.200,00	87,64
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat	292.500.000	290.035.000,00	99,16

	Pertemuan			
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.845.981.850	7.333.890.843,00	61,91
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.125.612.100	2.097.210.534,00	98,66
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	7.642.625.000	6.604.281.200,00	86,41
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	15.000.000	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	200.000.000	99.850.050,00	49,93
5.2.03.01.01.0019	Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan	1.449.760.000	1.449.756.000,00	100,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.099.378.500	1.071.000.000,00	97,42
5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	200.000.000	194.400.000,00	97,20
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	236.732.813	235.327.000,00	99,41
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.000.000.000	244.433.870,00	24,44
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	50.000.000	48.797.000,00	97,59
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	411.387.500	401.096.000,00	97,50
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.144.356.400	1.127.942.000,00	98,57
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5.133.312.000	2.667.432.000,00	51,96
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.100.000.000	1.081.632.000,00	98,33
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0	0,00	0,00
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	4.033.312.000	1.585.800.000,00	39,32
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	10.000.000	10.000.000,00	100,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	10.000.000	10.000.000,00	100,00
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	10.000.000	10.000.000,00	100,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	845.369.800	832.656.000,00	98,50
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	845.369.800	832.656.000,00	98,50
5.2.03.03.01.0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	845.369.800	832.656.000,00	98,50
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.867.820.000	2.864.832.000,00	99,90
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.867.820.000	2.864.832.000,00	99,90
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.867.820.000	2.864.832.000,00	99,90
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.500.000	7.500.000,00	100,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.500.000	7.500.000,00	100,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.500.000	7.500.000,00	100,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.777.985.963	162.263.060.381,00	85,50
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	135.637.718.826	122.011.704.029,00	89,95
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	124.584.364.400	112.186.014.029,00	90,05
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	108.562.910.300	97.622.580.000,00	89,92
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	16.021.454.100	14.563.434.029,00	90,90
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	0	0,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	11.053.354.426	9.825.690.000,00	88,89

5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	11.053.354.426	9.825.690.000,00	88,89
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	37.355.228.137	24.428.683.621,00	65,40
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.351.982.050	4.929.711.680,00	92,11
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	515.299.050	354.566.000,00	68,81
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.836.683.000	4.575.145.680,00	94,59
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.502.097.000	1.590.865.149,00	11,78
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.502.097.000	1.590.865.149,00	11,78
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0	0,00	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	12.620.144.000	12.303.368.000,00	97,49
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	2.225.615.000	2.207.433.000,00	99,18
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	7.892.855.000	7.610.590.500,00	96,42
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.501.674.000	2.485.344.500,00	99,35
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.881.005.087	5.604.738.792,00	95,30
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	5.881.005.087	5.604.738.792,00	95,30
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0	0,00	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	16.279.230.000	15.509.343.731,00	95,27
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	178.443.000	178.098.000,00	99,81
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	44.443.000	44.098.000,00	99,22
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	134.000.000	134.000.000,00	100,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0	0,00	0,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	0	0,00	0,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	3.809.925.000	3.102.211.000,00	81,42
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	3.809.925.000	3.102.211.000,00	81,42
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	4.000.000.000	3.985.000.000,00	99,63
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	4.000.000.000	3.985.000.000,00	99,63
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	8.290.862.000	8.244.034.731,00	99,44
5.2.04.03.06.0003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	7.580.697.000	7.533.869.731,00	99,38
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	710.165.000	710.165.000,00	100,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	238.809.000	235.629.000,00	98,67
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	238.809.000	235.629.000,00	98,67
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	238.809.000	235.629.000,00	98,67
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	267.000.000	77.700.000,00	29,10
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	267.000.000	77.700.000,00	29,10
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	267.000.000	77.700.000,00	29,10
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.003.600.700	5.376.917.000,00	89,56
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	458.084.000	314.372.000,00	68,63
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	458.084.000	314.372.000,00	68,63
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	358.184.000	215.292.000,00	60,11
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	0	0,00	0,00

5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	8.300.000	8.259.500,00	99,51
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	19.700.000	19.606.500,00	99,53
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	3.000.000	2.801.500,00	93,38
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	19.000.000	18.882.000,00	99,38
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	21.000.000	20.787.000,00	98,99
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	13.100.000	13.003.500,00	99,26
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	15.800.000	15.740.000,00	99,62
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.260.000.000	1.231.985.000,00	97,78
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.260.000.000	1.231.985.000,00	97,78
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.260.000.000	1.231.985.000,00	97,78
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.285.516.700	3.830.560.000,00	89,38
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.285.516.700	3.830.560.000,00	89,38
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.285.516.700	3.830.560.000,00	89,38
	JUMLAH BELANJA MODAL	376.239.383.080	327.524.592.440,00	87,05
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.800.000.000	2.812.377.640,00	74,01
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.800.000.000	2.812.377.640,00	74,01
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.800.000.000	2.812.377.640,00	74,01
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.800.000.000	2.812.377.640,00	74,01
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.800.000.000	2.812.377.640,00	74,01
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	3.800.000.000	2.812.377.640,00	74,01
5.4	BELANJA TRANSFER	149.016.684.800	143.673.836.429,00	96,41
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	149.016.684.800	143.673.836.429,00	96,41
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	200.000.000	0,00	0,00
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	200.000.000	0,00	0,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	200.000.000	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	148.816.684.800	143.673.836.429,00	96,54
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	68.314.744.800	63.171.896.429,00	92,47
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	68.314.744.800	63.171.896.429,00	92,47
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	80.501.940.000	80.501.940.000,00	100,00
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	80.501.940.000	80.501.940.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	149.016.684.800	143.673.836.429,00	96,41
	JUMLAH BELANJA	1.558.038.658.286	1.435.670.137.122,00	92,15
	SURPLUS/DEFISIT	(40.780.709.672)	50.654.167.776,16	(124,21)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	39.857.009.672	0,00	0,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.857.009.672	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	39.857.009.672	0,00	0,00

	Sebelumnya			
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	20.025.306.919	0,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.025.306.919	0,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.025.306.919	0,00	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	19.831.702.753	0,00	0,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	19.783.268.393	0,00	0,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	19.783.268.393	0,00	0,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	48.434.360	0,00	0,00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	48.434.360	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.857.009.672	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	39.857.009.672	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(923.700.000)	50.654.167.776,16	(5.483,83)

Maros, 31 Desember 2022

Kepala Badan

ANDI SAMSOPHYAN, SE., MM
NIP. 19709031996031001